

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PANCASILA 1 JUNI 1945

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

SULISTYORINI KUSUMASTUTI

(051314022)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

SKRIPSI

PANCASILA 1 JUNI 1945



Oleh:
SULISTYORINI KUSUMASTUTI
051314022

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Anton Haryono, M.Hum

Tanggal, 13 Januari 2010

Pembimbing II

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Tanggal, 13 Januari 2010

SKRIPSI

PANCASILA 1 JUNI 1945

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

SULISTYORINI KUSUMASTUTI
051314022

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal: 19 Februari 2010
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Dr. Anton Haryono, M.Hum	
Anggota	Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.	
Anggota	Dra. Theresia Sumini, M.Pd	

Yogyakarta, 19 Februari 2010

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan




Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius)

Tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan dari samudera yang tenang, tapi ia akan dilahirkan dari samudera yang penuh terpaan badai, gelombang dan topan

(D Farhan Aulawi)

Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini

(Samuel Taylor Coleridge)

PERSEMBAHAN



Karya kecil ini kupersembahkan untuk:

Tuhanku yang telah senantiasa mendampingi, melindungi, memberkati dan selalu memberikan segala petunjuk yang baik terhadap setiap langkah hidupku

Kedua orang tuaku yang tercinta,
(Bapak Richardus Wihardjo dan Ibu Supartinah)

Kakak yang tersayang
(FX. Sulisty Cahyono Adi)

Terima kasih atas dukungan dan motivasinya
(Semua teman di Pendidikan Sejarah khususnya angkatan 05)

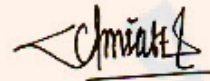
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 13 Februari 2010

Penulis,



Sulistyorini Kusumastuti



ABSTRAK

PANCASILA 1 JUNI 1945

SULISTYORINI KUSUMASTUTI

NIM : 051314022

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila, (2) Pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan (3) Pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi: pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis data), dan historiografi. Model penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sosial, politik, dan pendekatan psikologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila adalah adanya realitas masyarakat bangsa Indonesia yang pluralis dan multi etnis dengan adat istiadat, kepercayaan dan ciri khas kebudayaan yang berbeda; dengan dasar pendidikan dan pengalaman politik masa Hindia Belanda serta dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional, Soekarno dapat mewujudkan pemikirannya tentang Pancasila. (2) Pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 dan diterima secara aklamasi oleh semua anggota sidang. (3) Pemikiran Soekarno tentang Pancasila menjadi inti Pembukaan UUD 1945 yang terlihat bahwa lima prinsip dasar negara termuat pada alenia keempat yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ABSTRACT

PANCASILA JUNE 1st, 1945

SULISTYORINI KUSUMASTUTI

NIM : 051314022

This paper aims to describe and analyze: (1) the basic assumption of Soekarno's idea about Pancasila; (2) Pancasila presented by Soekarno in an Investigative Committee for the Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI), and (3) The Five Principles formulated by Sukarno which became the core of the preamble of the 1945 Constitution.

This method used in this research was historical method which covers: selection of topics, collecting sources, sources of criticism, interpretation, and historiography. This research is a descriptive analytical writing and applying social, political, and psychological approaches.

The results of this research are: (1) the basic assumption of Soekarno's idea about Pancasila is based on the reality of the Indonesian society which plural and has multi-ethnic customs, beliefs and characterized by different cultures, basic education and political experience in the Dutch East Indies which was influenced by leaders of national movement Soekarno succeeded in realizing his ideas about Pancasila; (2) Pancasila presented by Soekarno in an Investigative Committee for the Preparation of Indonesian Independence on June 1, 1945 accepted completely by all members of the assembly; (3) Pancasila became the core of the 1945 Constitution which can be seen in the five basic principles and accommodated in the fourth alenia, namely: Believe in the Almighty God, Just and civilized humanism, The unity of Indonesia and democracy, led by the wisdom of representative deliberation, Social justice for all Indonesian people.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pancasila 1 Juni 1945”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, program studi Pendidikan Sejarah.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan dan perhatian dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. T. Sarkim, M.Pd., Ph.D, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Y. Harsoyo, S. Pd., M. Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. B. Musidi, M.Pd., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H, alm., selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
5. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pengganti pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, M.M., selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
7. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan pada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Sanata Dharma.
8. Pihak sekretariat Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan makalah ini.
9. Staf UPT Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapat referensi.
10. Kedua orang tua dan kakakku tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang sangat besar.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan bantuan pada perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi pembaca.

Penulis,

Sulistyorini Kusumastuti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Sulistyorini Kusumastuti

Nomor Mahasiswa : 051314022

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

“PANCASILA 1 JUNI 1945”

beserta perangkat yang diperlukan. Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2010

Yang menyatakan



(Sulistyorini Kusumastuti)

DAFTAR ISI

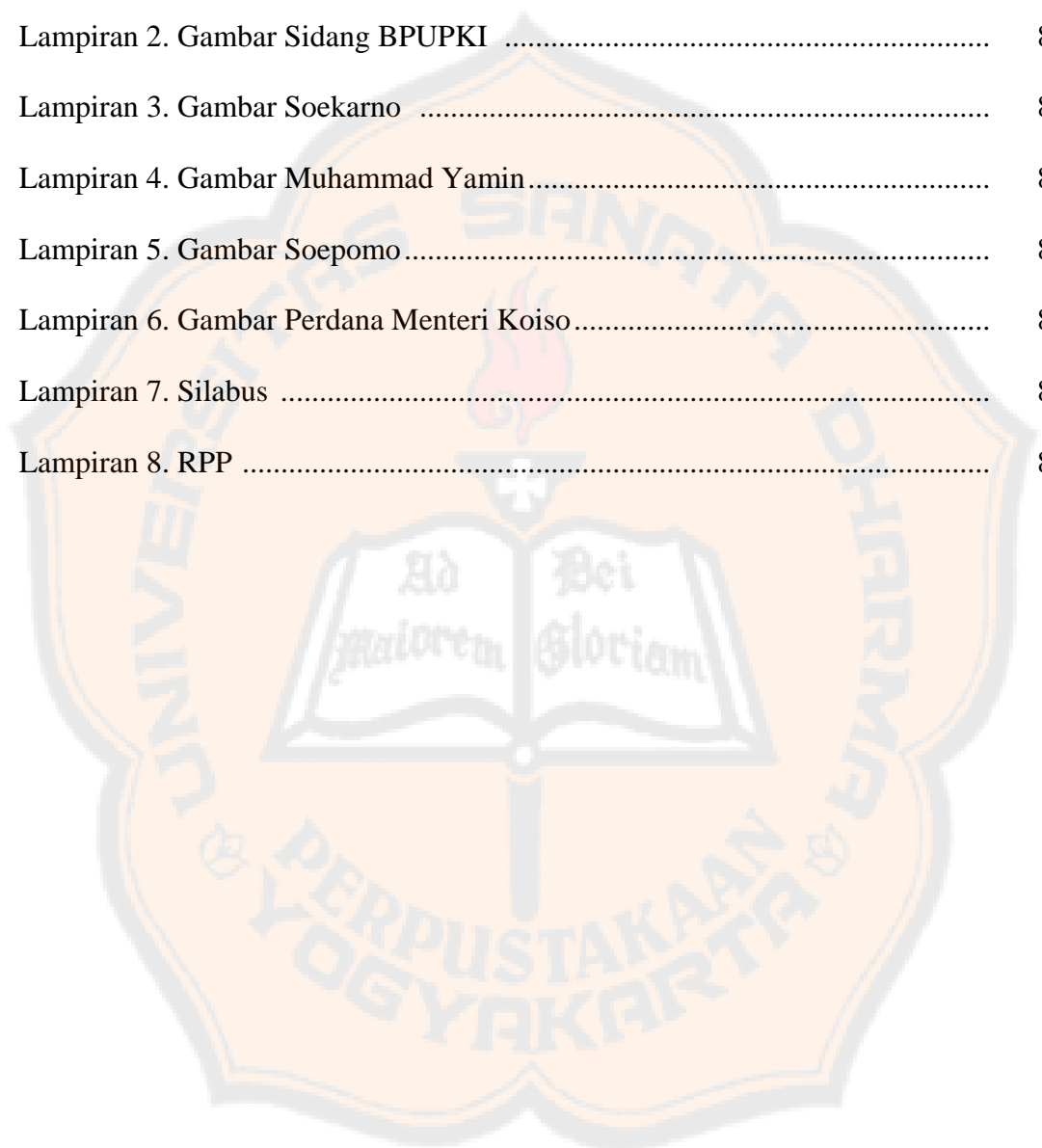
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	ix
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Landasan Teori	9
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PANCASILA	25
A. Nasionalisme	27
B. Internasionalisme atau Perikemanusiaan	36
C. Mufakat atau Demokrasi	37
D. Kesejahteraan Sosial	38
E. Ketuhanan	40
BAB III. PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PANCASILA DISAMPAIKAN DALAM SIDANG BPUPKI	43
A. Soekarno Menyajikan Konsep Pancasila Dalam Sidang BPUPKI	43
B. Perbedaan Pendapat dalam Sidang BPUPKI	56
BAB IV. PIDATO SOEKARNO TENTANG PANCASILA DIRUMUSKAN MENJADI INTI PEMBUKAAN UUD 1945	58
A. Sidang BPUPKI II dalam Merumuskan Pembukaan UUD 1945	60
B. Penjabaran Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945	62
BAB V. KESIMPULAN	72
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
SUPLEMEN	85

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Susunan Anggota-Anggota BPUPKI	78
Lampiran 2. Gambar Sidang BPUPKI	80
Lampiran 3. Gambar Soekarno	81
Lampiran 4. Gambar Muhammad Yamin.....	82
Lampiran 5. Gambar Soepomo.....	83
Lampiran 6. Gambar Perdana Menteri Koiso.....	84
Lampiran 7. Silabus	85
Lampiran 8. RPP	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa penjajahan asing di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, penjajahan Belanda kemudian penjajahan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816, kemudian diduduki kembali oleh Belanda sampai pada tahun 1942 hingga kemudian penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dengan tujuan untuk mengerahkan massa rakyat, bangsa Jepang datang dengan membawa propaganda semboyan dan semangat “Tiga A” yang berbunyi Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia.¹ Hal ini didorong oleh ambisi Jepang untuk menguasai Asia. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama karena sekutu semakin mendesak Jepang, maka mulai muncullah siasat Jepang untuk bermurah hati kepada rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia.

Dengan kemenangan Jepang atas Belanda pada maret 1942 telah membebaskan rakyat dari dominasi kolonial dan memulai suatu babak baru dalam kesatuan keluarga bangsa Asia yang didasarkan kemakmuran bersama. Hal itulah yang merupakan hasrat rakyat selama ini. Namun waktu kemenangan tidak segera tiba karena memerdekakan Indonesia bukan prioritas utama Jepang. Hal itulah yang kemudian mendorong perjuangan baru.

¹ P.J.Suwarno, *Tatanegara Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 83.

Seperti diketahui, bangsa Indonesia sudah sejak lama setelah kedatangan imperialisme dan kolonialisme hidup di bawah penjajahan. Selama penjajahan berlangsung, timbul perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah yang menentang penjajahan dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Namun sayang perjuangan kemerdekaan tersebut masih bersifat kedaerahan sehingga dengan mudah penjajah dapat menghadapinya karena tidak kompak dan terpecah kekuatannya di berbagai daerah tertentu. Meskipun perjuangan-perjuangan tersebut masih bersifat kedaerahan, namun makna dari perjuangan mereka sama yaitu ingin memerdekakan diri untuk kehidupan yang bebas.

Pada awal abad ke-20 baru muncullah gerakan kebangsaan yang pada awalnya bersifat pendidikan, sosial dan keagamaan, kemudian baru menjadi gerakan partai politik. Dari kekuatan-kekuatan baru yang berubah menjadi gerakan-gerakan massa rakyat yang progresif revolusioner ini tercermin adanya tiga macam aliran yang mendasarkan cita-cita politik perjuangannya di atas tiga macam ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan *Marxisme*.

Setelah melakukan pergerakan kebangsaan sekitar empat dasawarsa, bangsa Indonesia menghadapi suatu masalah yang sangat asasi pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI si ketika mereka pada akhirnya sampai pada gerbang kemerdekaan pada tahun 1945. Hal ini disebabkan karena dalam mendirikan suatu negara diperlukan syarat-syarat yang mutlak antara lain wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun demikian, Indonesia dihadapkan pada situasi yang rumit karena rakyatnya yang beraneka ragam suku dan agamanya, beraneka adat dan ethnologinya. Hal inilah yang kemudian mendorong rakyat membutuhkan satu dasar pemersatu.

Pengalaman dari masa lampau dan adanya kenyataan mengenai kondisi masyarakat Indonesia ini kemudian menjadi perhatian dan pertimbangan para tokoh Indonesia khususnya Soekarno yang pada saat itu berada di bawah tentara fasis Jepang. Mereka kemudian secara sadar berkeinginan untuk membuat suatu dasar pemersatu dengan mengambil kesempatan yang diberikan Jepang untuk segera membuat kesepakatan bersama dalam merumuskan dasar falsafah negara yang akan didirikan. Melalui sidang-sidang BPUPKI maka muncul pemikiran-pemikiran mengenai dasar negara yang pada akhirnya terjadi kesepakatan mengenai dasar falsafah negara yang merupakan satu dasar pemersatu. Dasar pemersatu itu adalah Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak bisa lepas dari peran dan pemikiran Soekarno sendiri yang merupakan seorang aktifis pergerakan yang mempunyai gagasan mengenai dasar dalam pembentukan negara sesuai dengan situasi, pandangan, serta kepribadian yang mewakili seluruh rakyat.

Soekarno merupakan tokoh pemikir dan aktivis dalam pergerakan di Indonesia jauh sebelum pada akhirnya menjadi tokoh dominan dalam panggung politik Indonesia. Pemikiran Soekarno memuncak pada tahun 1926 tentang garis pemikiran dasarnya mengenai Nasionalisme, Islam dan *Marxisme*. Dalam mengemukakannya, Soekarno lebih melihat tentang persamaan dan kerjasama antar ketiga ideologi ini dengan menggunakan pendekatan filsafat Jawa. Sinkretisme Jawa melihat nasionalisme, Islam dan marxisme adalah satu, sebab ketiga unsur ini melawan kolonialisme dan imperialisme Barat.² Inilah yang kemudian menjadi sebuah titik kunci awal bagi tercapainya cita-cita nasionalisme.

² Bernhard dahm, *Soekarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, LP3ES, hlm. xvi

Soekarno kemudian merumuskan pemikirannya dalam suatu dasar yang disebutnya sebagai Pancasila yang kemudian merupakan produk politis karena berkaitan dengan pembentukan negara dan masyarakat sekaligus sebagai jembatan emas untuk suatu negara merdeka yang akan didirikan dan untuk mengatur segala aspek kehidupan. Soekarno yang merupakan seorang pemikir, sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa sehingga hal itu tidak hanya mendasari dalam pemikirannya terhadap ketiga aliran namun juga menunjuk pada pendekatan sinkretis yang digunakan dalam pemikiran mengenai Pancasila.

Pendekatan sinkretis Soekarno terlihat dalam perumusan Pancasila yang merupakan buah pemikirannya yang kemudian ditawarkan tidak bersikeras harus menggunakan lima sila tapi dapat diperas menjadi tiga sila (trisila) atau menjadi satu sila saja (ekasila).

Pancasila kemudian dijadikan dasar filsafat negara Indonesia yang merupakan dokumen resmi tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai salah satu revitalisasinya. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³

³ Sutarjo Adisusilo, *1938: Ngablak Dan Dunia Dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 55.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam penulisan ini. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Apa latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila?
2. Bagaimana pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI?
3. Bagaimana pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari pembukaan UUD 1945?

C. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI.
3. Mendiskripsikan dan menganalisis pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari pembukaan UUD 1945.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan disumbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Untuk menambah dan memperkaya khasanah pustaka yang berguna bagi pembaca serta memberikan tambahan informasi mengenai sejarah Indonesia,

sehingga dapat memperlancar pengajaran sejarah di awal kemerdekaan negara Indonesia khususnya mengenai Pancasila 1 Juni 1945.

b. Bagi Ilmu pengetahuan

Bagi Ilmu pengetahuan, skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan sejarah khususnya sejarah Indonesia, serta untuk melengkapi kajian mengenai Pancasila 1 Juni 1945.

c. Bagi penulis

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah khususnya mengenai Pancasila 1 Juni 1945.

E. Kajian Pustaka

Skripsi ini berjudul “Pancasila 1 Juni 1945”. Skripsi ini dibuat menggunakan metode studi pustaka, maka untuk membahasnya diperlukan buku-buku atau dokumen yang membahas tentang Pancasila 1 Juni 1945 serta buku-buku lain yang mendukung agar dalam penulisan skripsi ini bisa menghasilkan tulisan yang bermutu baik.

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau dengan alat-alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa.⁴ Louis Gottchalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu

⁴ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Pres, 1969, hlm. 35.

“asli” (asli yang dimaksud adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus “asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama.⁵ Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan.⁶

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Moh Hatta pada tahun 1970. Buku ini berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam memperjuangkan kemerdekaan hingga berlangsungnya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Buku ini digunakan untuk membahas bab IV yaitu mengenai pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.

Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Muhammad Yamin pada tahun 1959 yang diterbitkan Yayasan Prapantja. Buku ini berisi kumpulan naskah-naskah yang melahirkan dan yang menyebabkan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tetap. Buku ini digunakan untuk membahas bab III mengenai pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI.

⁵ *Ibid*, hlm. 36

⁶ *Ibid*, hlm. 35

Sukarno An Autobiography oleh Cindy Adams pada tahun 1980 yang diterbitkan oleh Gunung Agung. Buku ini berisi mengenai biografi Soekarno dari latar belakang sosial, pendidikan hingga perannya dalam politik. Buku ini digunakan untuk membahas bab II mengenai latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila.

Di Bawah Bendera Revolusi oleh Sukarno yang berisi tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan, konsep-konsep pemikiran Sukarno dan gagasan-gagasan para tokoh dalam perumusan dasar negara hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Buku ini digunakan untuk membahas bab II.

Selain sumber primer diatas masih ada sumber lain atau sumber sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung dari peristiwa yang dikisahkan. Adapun buku yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, buku ini ditulis oleh Bernhard Dahm pada tahun 1987 yang diterbitkan oleh LP3ES. Buku ini yang berisi tentang latar belakang pribadi Soekarno sebagai seorang pemikir yang diiringi dengan sepak terjangnya sebagai politikus dalam pergerakan Indonesia. Buku ini digunakan untuk membahas bab II mengenai latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila.

Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, buku ini ditulis oleh PJ Suwarno pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh Kanisius. Buku ini membahas mengenai unsur-unsur Pancasila yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian

dibudayakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah diidealisasikan dan dirumuskan menjadi Pancasila formal sebagai dasar falsafah, sumber hukum dari segala sumber hukum, dan ideologi negara. Buku ini dipakai sebagai acuan untuk membahas bab III.

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1995 yang diterbitkan Sekretariat Negara RI. Buku ini berisi kumpulan naskah-naskah yang melahirkan dan yang menyebabkan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) hingga pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tetap. Risalah ini merupakan penyempurnaan dari Naskah Persiapan UUD 1945 oleh Muhammad Yamin. Buku ini digunakan untuk membahas bab III mengenai pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI dan bab IV mengenai pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.

Bung Karno Putera Fadjar, buku ini ditulis oleh Solichin Salam dan diterbitkan oleh Gunung Agung pada tahun 1966. Buku ini menguraikan tentang siapakah Soekarno, cita-cita Soekarno, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan hingga Soekarno dimata dunia. Buku ini digunakan untuk membahas permasalahan pada bab II tentang latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila.

F. Landasan Teori

Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan, sebab tanpa teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak

akan ada ilmu pengetahuan. Selain menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan, teori juga memberikan kerangka orientasi atau arahan untuk melakukan analisis dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Teori juga memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi dan mengisi kekosongan dalam pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah atau sedang terjadi.⁷

Bertolak dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas, untuk menjelaskan lebih jauh mengenai permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini, maka berturut-turut akan dikemukakan uraian mengenai kerangka konsepnya yakni:

1. Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Nasionalisme atau jika disederhanakan merupakan semangat cinta bangsa dan cinta tanah air (patriotisme) mempunyai berbagai perwujudan sesuai dengan tuntutan jamannya. Pada masa revolusi, nasionalisme lebih identik dengan mengangkat senjata. Relevansi nasionalisme menurut Prof. Sartono Kartodirdjo tidak perlu disangsikan asal saja nasionalisme masih mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya untuk mewujudkan 1).Kesatuan (unity), 2).Kebebasan (liberty), 3).Kesamaan (equality), 4).Individualitas, 5).Prestasi sebagai bangsa.⁸ Menurut Benedict Anderson nasionalisme sebagai “*an imagined political community and imagined as inherently limited and sovereign*”⁹ (nasionalisme merupakan perwujudan dari pembayangan suatu komunitas politis dan itu secara mandiri dan terbatas).

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, 1989, hlm.10.

⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*, Jogjakarta, Aditya Media, hlm.16.

⁹ Sutarjo Adisusilo, “*Nasionalisme Italia pada abad ke XIX “ dalam Nasionalisme di Berbagai Negara*, Yogyakarta, USD, 1996, hlm 41.

Nasionalisme menurut Ernest Renan adalah suatu paham sekelompok orang yang mempunyai keinginan bersama untuk bersatu dan mempertahankan persatuan¹⁰. Nasionalisme menurut Ig. Haryono adalah perasaan senasib dan sepenanggungan dalam lingkup bangsa dalam bentuk kepedulian dan kepekaan akan masalah-masalah (yang dihadapi) bangsa baik yang menyangkut masalah regional maupun internasional termasuk di dalamnya rasa solider terhadap nasib mereka yang tertindas, peningkatan kesadaran pengetahuan, dan kepedulian pada masalah-masalah bangsa yang menyangkut bangsa.¹¹ Menurut Soeprapto nasionalisme adalah suatu faham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga negara ditujukan kepada negara.¹²

Sedangkan menurut Agus Surata, nasionalisme adalah pandangan sikap dan atau perbuatan yang mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kepentingan pribadi atau kelompok.¹³

Dari beberapa teori di atas dapat ditarik kesimpulan nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi diberikan kepada bangsa oleh karena perasaan senasib dan sepenanggungan dan berusaha untuk mempertahankan persatuan. Hal ini dapat dilihat dengan mencari kesinambungannya, asal mulanya suatu gejala, bahkan setiap gejala perlu dipandang sebagai produk perkembangan masa lampau. Disinilah kesadaran sejarah yang mampu memperkuat kesadaran nasional.

¹⁰ Ernest Rohan, *Apakah bangsa Itu ?* (terjemahan), Bandung, alumni hlm 53-54.

¹¹ Ign. Haryono, “ *Nasionalisme Dewasa Ini : Beberapa Lontaran Pemikiran Orang Muda “ dalam Pendidikan Wawasan Kebangsaan : Tantangan dan Dinamika Perjuangan kaum Cendekiawan Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 1994, hlm 161.

¹² Roeslan Abdulgani, *Indonesia Menatap masa Depan*, Jakarta, Pusat Merdeka, hlm 18.

¹³ Agus Surata, *Runtuhnya Negara bangsa*, Yogyakarta, UPN veteran press, edisi I, 2002, hlm 258.

Kesadaran nasional bertumpu pada pengalaman kolektif sepanjang masa yang merupakan proses perkembangan unsur-unsur etnik, kultural, dan politik yang telah mengalami pengintegrasian yang secara lambat laun mewujudkan kesatuan, yang hal ini dapat terlihat jelas pada nasionalisme kebangsaan yang sangat menyadari kenyataan yang bersifat *bhinneka tunggal ika* yang merupakan sifat dasar masyarakat nusantara. Seperti ungkapan dari Ki Hajar Dewantara yaitu *“Janganlah menyatukan apa yang tidak dapat disatukan, janganlah menyatukan apa yang tidak perlu disatukan, kesatuan dalam dasar dan asas, dalam pokok-pokoknya cukuplah. Bahkan itulah satu-satunya syarat untuk dapat menggalang persatuan dan kesatuan yang kokoh dan abadi”*¹⁴. Berdasarkan uraian teori diatas, lahirnya Pancasila tidak lepas dari teori nasionalisme yang merupakan dasar pendorong rakyat untuk membentuk suatu negara dengan satu dasar pemersatu.

2. Dasar Negara

Dasar negara dapat diartikan fundemen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pancasila dalam kehidupannya ini sering disebut dengan istilah dasar filsafat atau dasar falsafah negara, Ideologi Negara, *Staat Idee* dan *philosophische Grondslag*. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila

¹⁴ S. A. Kodhi dan R. Soejadi, *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1988, hlm. 99-100.

merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹⁵ Konsekuensinya seluruh pelaksana dan penyelenggara negara, segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suatu kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam Undang-undang Dasar maupun yang tidak tertulis.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dan segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran.
- b. Meliputi suasana kebatinan (*Geislichenhintergrund*) dari UUD 1945.

¹⁵ Rozikin Daman, *Pancasila dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 1992, hlm. 9.

- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d. Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran keempat yang bunyinya sebagai berikut “ Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.
- e. Merupakan sumber semangat dari UUD 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring zaman dan dinamika masyarakat dan negara tetap diliputi atas asas kerohanian negara.

Sebagaimana telah ditentukan pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini sesuai dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari negara Indonesia. Dikatakan juga bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan

negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pembentukan dari budi nurani manusia.

3. Pandangan Hidup

Pandangan hidup diartikan seperangkat nilai dasar yang diyakini benar dan baik sehingga mendorong manusia untuk mengamalkan dalam hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila berfungsi sebagai petunjuk hidup. Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan dalam segala bidang.¹⁶

Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

¹⁶ Ismaun, *Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dan Dasar Negara RI*, Bandung, CV.Yulianti, 1990, hlm. 85.

Sebagai pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang mendalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dalam pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran atau kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan hidup merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan suatu cita-cita dan tekad untuk mewujudkannya.¹⁷

G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

1. Metodologi Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi Pancasila 1 Juni 1945, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Proses menguji dan menganalisis di sini maksudnya adalah merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi¹⁸. Metode penulisan sejarah adalah cara atau pedoman yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi,

¹⁷ Ali Emran, *Penuntun Kuliah Pancasila (Untuk Perguruan Tinggi)*, Bandung, IKAPI, hlm. 2.

¹⁸ Louis Gottschalc, *op.cit.*, hlm 32.

sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia¹⁹.

Dalam penelitian sejarah ada lima tahap yang harus dilalui untuk dapat merekonstruksi suatu peristiwa sejarah, yaitu :

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah pertama dalam penelitian yang harus dijalankan oleh peneliti agar dalam pelaksanaan penelitian nanti apa yang ingin ditulis oleh penulis dapat lebih jelas. Dalam menentukan topik harus didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Untuk itu diperlukan beberapa kriteria dalam pemilihan topik yaitu, topik harus memiliki nilai, yang artinya di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat, topik harus orisinal yang berarti apa yang ditulis belum pernah ditulis oleh orang lain, topik harus praktis berarti bahwa pemilihan topik disini apabila dilanjutkan ke penelitian tidak memakan waktu, topik harus memiliki kesatuan tema dan topik disini harus berangkat dari suatu permasalahan.²⁰

Topik atau judul yang ditentukan dalam penulisan ini adalah “Pancasila 1 Juni 1945”. Topik ini sungguh menarik untuk diteliti karena begitu besarnya pengaruh pidato Soekarno dalam melahirkan Pancasila 1 Juni 1945 yang nantinya digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Topik ini juga bermanfaat bagi calon guru sejarah untuk lebih memahami tentang perjuangan Soekarno sebagai *founding father* bangsa Indonesia yang berdaulat.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Saefur Rohmat, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hlm. 154.

b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Setelah menentukan topik langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ialah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris datum bentuk tunggal, data bentuk jamak, bahasa latin datum berarti pemberian) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis²¹. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan topik yang akan ditulis. Bahan puataka yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno An Autobiography, Di Bawah Bendera Revolusi*. Sedangkan sumber sekundernya ialah *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno Putera Fadjar*.

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya ialah verifikasi, yaitu pengujian terhadap data-data yang ada untuk mengetahui apakah data dapat dipertanggung jawabkan keasliannya atau tidak. Tahap verifikasi ini terdiri dari dua macam yaitu, otentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai (kritik intern).²²

²¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2001, hlm 94.

²² *Ibid*, hlm. 101.

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian sumber yang akan digunakan. Hal yang diteliti ialah penampilan luar sumber, misalnya kertasnya, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, kata-katanya, jenis huruf, dsb. Kritik intern dilakukan untuk meneliti apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya kebenarannya. Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga akan diperoleh fakta yang lebih jelas dan lengkap.²³

Contoh dari verifikasi dalam penulisan skripsi ini adalah adanya perbedaan mengenai siapa sebenarnya penggali Pancasila sebenarnya antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Dalam buku naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa rumusan Muhammad Yamin merupakan rumusan yang paling mendekati rumusan Pancasila 1945. Namun Muhammad Hatta mengatakan hal yang lain yang dapat dilihat dalam bukunya Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam buku Uraian Pancasila. Dia menyakini bahwa Soekarno penggali Pancasila.

Perbedaan ini penulis temukan setelah mencocokkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Setelah penulis teliti lebih lanjut, pada akhirnya penulis memilih Soekarno yang merupakan penggali Pancasila sebenarnya. Pemilihan ini penulis ambil karena setelah penulis membaca buku Muhammad Hatta, penulis mendapatkan penjelasan bahwa Muhammad Hatta menyanggah pidato Muhammad Yamin dalam bukunya yakni bahwa pidatonya yang tertanggal 29 Mei 1945 itu diucapkan pada waktu Piagam Jakarta akan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 dan hal itulah yang rupanya dicantumkan di dalam bukunya dengan diberi tanggal 29 Mei 1945. Dengan

²³ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 102

demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila telah dirumuskan secara eksplisit oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

d. Interpretasi Data (Analisis Data)

Disebut juga penafsiran yang sering pula disebut sebagai bias subyektivitas. Subyektivitas penulis sejarawan harus dihindari. Interpretasi bisa dua macam yaitu analisis berarti menguraikan dan sintesis berarti menyatukan di mana setelah ada data kemudian ditemukan fakta.

Analisis sumber merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam interpretasi ini terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang sudah dinilai keabsahannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian bisa mendekati keadaan yang sebenarnya dan mampu mengurangi subjektivitas yang bisa muncul dalam historiografi.

Contoh dari interpretasi (analisis data) ini adalah pada bab II yang berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran Soekarno dalam melahirkan gagasannya mengenai Pancasila. Dalam mengkaji masalah ini maka penulis harus melakukan analisis atau penafsiran dari sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. Hal ini dikarenakan dalam sumber-sumber tersebut tidak ada yang menjelaskan secara jelas faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Soekarno dalam melahirkan gagasannya mengenai Pancasila sehingga dari sana penulis melakukan analisis data yaitu dengan mencoba mencari keterkaitan antara data-data yang diperoleh penulis dari penjelasan dalam sumber-sumber tersebut. Hal ini akan membuat tulisan ini menjadi lebih obyektif dan menarik.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber-sumber yang terkait di dalamnya, yang memberikan gambaran mengenai rangkaian atau peristiwa dalam penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga dapat lebih mudah mengetahui kapan peristiwa tersebut sebenarnya terjadi.

Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui beberapa kriteria yang telah tercantum dalam metode penulisan sejarah. Metode tersebut antara lain pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Di samping itu penelitian ini mencakup beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh penulis, antara lain: topik, latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode deskripsi analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁴ Dalam skripsi ini penulis menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu menggambarkan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang identik dengan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, sebuah tinjauan perspektif historis-politis dengan menggunakan sudut pandang yang mengikuti garis perkembangan waktu tertentu.

²⁴ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.

2. Pendekatan

Pengertian pendekatan dalam penelitian sejarah adalah cara pandang atau pola pikir dari si penulis terhadap suatu peristiwa sejarah dari sudut pandang tertentu. Dalam penulisan sejarah pendekatan sangat diperlukan sebagai cara seorang sejarawan atau penulis untuk memandang suatu peristiwa atau kejadian karena dengan pendekatan akan mempermudah seorang sejarawan atau penulis untuk memandang dimensi-dimensi mana yang perlu diperhatikan, unsur-unsur mana yang perlu diungkap dan sebagainya²⁵. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan multidimensional untuk membahas permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan multidimensional adalah suatu pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya. Pendekatan multidimensional dalam penulisan ini antara lain: pendekatan sosial, politik, dan psikologi.²⁶

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji segi-segi sosial dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini pendekatan sosial digunakan untuk mengkaji hubungan Soekarno dengan rakyat yang memunculkan pemikiran-pemikirannya tentang Pancasila, dan berbagai aspek latar belakang terjadinya perjuangan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan keadaan sosial dalam masyarakat akibat pendudukan Jepang di Indonesia.

²⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm. 4.

²⁶ *Ibid.*, hlm 72

Pendekatan politik dipakai untuk mamahami beberapa konsep dalam penelitian ini yang memakai konsep politik, contoh tentang konsep dari pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila itu sendiri.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan adanya tanggapan dari dalam diri manusia.²⁷ Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan secara garis besar sifat dasar dari Soekarno yang berkepribadian berani, revolusioner, nasionalis, bekerja keras dan pantang menyerah. Jiwa nasionalis yang mendorongnya untuk ikut ambil bagian dalam menyatukan berbagai aliran yang ada. Pandangannya yang jauh ke depan mendorongnya untuk menggali pemikiran-pemikirannya dan merumuskan menjadi Pancasila yang mawadahi seluruh golongan. Selain itu latar belakang sosial-budaya, pendidikan dan politik Soekarno juga mendorongnya untuk ikut dalam dunia perpolitikan mewujudkan negara yang merdeka.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memaparkan secara garis besar mengenai Pancasila 1 Juni 1945. Adapun kerangka penulisan ini sebagai berikut :

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

²⁷ Robert F, Berchover, *A Behavioural Approach to Historical Analysis*, New York, A Free Press Paperback, hlm. 7.

Bab II Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai keadaan sosial dan pengalaman politiknya dalam proses diperolehnya pemikiran mengenai Pancasila.

Bab III Merupakan penjelasan tentang pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI.

Bab IV Menjelaskan tentang pidato Soekarno dirumuskan menjadi inti dari pembukaan UUD 1945.

Bab V Berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang latar belakang pemikiran Soekarno tentang Pancasila, pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI, serta pidato Soekarno dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN SOEKARNO

TENTANG PANCASILA

Terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan merupakan kesadaran seluruh komponen bangsa tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku, adat istiadat, tradisi dan bahasa. Kesadaran itu lahir dari kehendak bersama untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan kolonial yang tidak sesuai dengan semangat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Semangat ini menjadi modal dasar dan landasan kuat untuk menyatukan dan melebur dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang pluralis, maka perjuangan bangsa Indonesia untuk menyatukan berbagai bentuk kepentingan yang ada pada saat itu sangatlah tidak mudah. Hal ini karena berbagai corak pemikiran maupun cita-cita masing-masing daerah dipengaruhi oleh karakteristik budaya dan perilaku pemimpin tiap daerah. Kondisi bangsa tersebut tidak disia-siakan oleh para tokoh nasionalis dan sekuler serta sosial demokrat, seperti Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Sutomo, Moh. Hatta, Mr. Syahrir dan lain-lain yang segera tampil di tengah pergulatan politik nasional, sehingga kondisi yang demikian dapat dinetralisir dengan rasa nasionalisme yang cukup tinggi.

Pupuk nasionalisme yang ditaburkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya telah menumbuhkan suburkan pemikiran dan jiwa Soekarno bersama

para tokoh yang lain. Bagi tokoh-tokoh nasionalis tersebut secara simbolik ide nasionalisme yang dimunculkan oleh para tokoh pergerakan sebelumnya secara implisit telah memberikan sebuah kontribusi pendidikan patriotisme yang nantinya akan mendasari pergerakan kebangsaan untuk Indonesia merdeka. Melihat situasi bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai aliran politik yang mewarnai perpolitikan nasional, setiap pemimpin pergerakan nasional bergerak untuk memikirkan suatu konstitusi bagi negara yang kelak akan dibentuk. Dalam hal ini muncul tokoh yang fenomenal memikirkan tentang dasar negara yaitu Soekarno (lihat lampiran 3). Soekarno mengusulkan tentang dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digali oleh Soekarno dari pengalaman dengan melihat realitas bangsa Indonesia yang pluralis dan pendidikannya serta nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia.

Kunci dari pemikiran Soekarno didasari oleh konsep mitologi Jawa yakni konsep kepercayaan masyarakat Jawa sebagaimana tercermin dalam cerita-cerita wayang, ide Ratu Adil, dan Jayabaya. Frustasi, harapan dan juru selamat merupakan intisari dari konsep kepercayaan ini. Frustasi sebagai akibat dari adanya penindasan, penjajahan, dan ketidakadilan pada saat yang sama menumbuhkan adanya harapan dan keinginan yang tinggi tentang suatu perubahan zaman yang diidam-idamkan. Perubahan zaman akan datang bersamaan dengan datangnya Ratu Adil yang akan menjadi juru selamat. Hal ini juga didasari oleh adanya mitos masyarakat Jawa yaitu ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya menunjukkan suatu gambaran bahwa proses perkembangan masyarakat Jawa mendukung beberapa masa turun dan masa naik sebelum

sampai pada titik akhir. Dengan kata lain, masyarakat Jawa dalam perkembangannya akan berpindah dari satu masa transisi ke satu masa transisi lain dalam proses waktu yang lama karena tidak akan mungkin akan selalu berada dalam keadaan yang sama. Selain itu, dapat dilihat bahwa suatu transisi dimulai dengan munculnya seorang juru selamat yakni Ratu Adil yang berhasil menyingkirkan rezim sebelumnya yang telah jatuh hancur.²⁸ Hal inilah yang menunjukkan peran pentingnya pengaruh kebudayaan Jawa nantinya akan mendasari pemikiran-pemikiran Soekarno dalam proses sosialisasi politik dan perkembangan intelektualitas Soekarno sampai pada pemikiran tentang dasar negara.

A. Nasionalisme

Pemikiran Soekarno akan nasionalisme telah terbentuk sejak ia masih kecil. Soekarno akrab dengan kisah-kisah pewayangan lewat pertunjukan wayang yang ditontonnya yang kemudian terinternalisasi nilai-nilai dalam budaya Jawa yang kemudian turut pula berperan dalam membentuk kepribadiannya. Dari pertunjukan-pertunjukan wayang seperti *Bharata Yudha*, *Mahabharata*, dan *Ramayana* itulah terpendam sebuah aspirasi dan dari ini pula suatu hasrat akan kemerdekaan terus dihidupkan sebagaimana ia juga ditumbuhkan oleh gagasan tentang Ratu Adil.²⁹

Pada saat ia menempuh pendidikan di (*Europeesche Lagere School (ELS)*), Soekarno merasakan adanya diskriminasi. Bentuk diskriminasi itu seperti ia tidak

²⁸ Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm.114-115.

²⁹ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm. 29

dapat menjadi anggota perkumpulan sepak bola yang kebanyakan anggotanya anak-anak Belanda. Soekarno diejek sebagai *inlander* dan diludahi oleh anak-anak berambut pirang. Sejak saat itu Soekarno menjadi kurang simpatik terhadap Belanda. Pada waktu di HBS (*Hogere Burger School*) diskriminasi terlihat pada nilai yang diberikan. Nilai kecakapan diukur dengan angka, angka tertinggi 10 dan angka 6 adalah angka batasan yang kebanyakan diterima oleh *inlander*.³⁰ Diskriminasi dalam dunia pendidikan telah mempengaruhi pemikiran Soekarno terhadap pemerintah kolonial.

Di tempat Tjokroaminoto, Soekarno belajar politik. Tjokroaminoto adalah seorang politikus Sarekat Islam. Di tempat ini Soekarno bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Semaun, Alimin, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, Agus Salim dan sebagainya. Soekarno sering terlibat dalam diskusi dengan mereka tentang nasib bangsa ini. Lambat laun pemikiran Soekarno terpengaruh politik mereka yang anti penjajah.

Pada saat di *Hogere Burger School*, Soekarno pertama kalinya mengenal teori Marxisme dari seorang gurunya yakni C. Hartagh, seorang penganut paham sosialis demokrat. Hartagh juga memimpin *debating club* (semacam diskusi) dari murid-murid HBS Surabaya.³¹ Soekarno menjadi salah satu murid favoritnya. Hartagh menilai Soekarno cakap berbicara dan dapat memimpin kawan-kawannya. Beliau pernah mengatakan bahwa Soekarno adalah calon pemimpin dari suatu revolusi dimasa yang akan datang. Hartagh menamainya Karel, bahkan memanggilnya *Schat*.³² Disamping sebagai guru di HBS Hartagh juga menjadi

³⁰ Cindy Adams, *Sukarno An Autobiography*, Jakarta, Gunung Agung, 1966, hlm. 59.

³¹ Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo, *op. cit.*, hlm. 139.

³² Cindy Adams, *op.cit.*, hlm 60.

anggota *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV). Hartagh menghendaki suatu perkembangan yang bertahap bagi kaum pribumi sebelum dimulai perjuangan mati-matian melawan kapitalisme.³³

Soekarno juga telah aktif dalam kegiatan, seperti telah mendirikan perkumpulan politik yang bernama Trigoro Darmo, yang berarti tiga tujuan suci yang didasarkan pada akal, budi, sakti dan melambangkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial yang dicari.³⁴ Ini pada dasarnya adalah sebuah organisasi para pelajar yang seusia dengannya pada saat itu dan berlandaskan kebangsaan, maka kegiatannya adalah mengembangkan kebudayaan, mengumpulkan dana sekolah dan membantu korban bencana alam. Disamping itu, Soekarno juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh *Studieclub*, sebuah kelompok yang aktif membahas buah pikiran dan cita-cita nasional.

Di *studieclub* inilah pertama kalinya Soekarno berpidato yang didorong oleh sikap tidak setuju bahwa menguasai bahasa Belanda adalah menjadi keharusan bagi generasi muda dan sebaliknya, Soekarno mengimbau anggota *studieclub* untuk bersatu dan mengembangkan bahasa melayu, baru kemudian bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena bahasa ini merupakan bahasa diplomatik.³⁵ Pada saat di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Oemar Said Tjokroaminoto saat itu. Soekarno kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa).

³³ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm. 36.

³⁴ Cindy Adams, *op.cit.*, hlm. 57.

³⁵ Solichin Salam, *BUNG KARNNO: Putera Fadjar*, Djakarta, Gunung Agung, 1966, hlm.59.

Setelah Soekarno menyelesaikan sekolahnya di HBS pada tahun 1921, ia kemudian melanjutkan ke *Technische Hooge School (THS)* yang sekarang dikenal dengan ITB Bandung dan selesai pada tahun 1926.³⁶ THS sendiri baru dibuka secara resmi pada tanggal 3 Juni 1920 di Bandung dengan Prof. Ir. G. Klopper sebagai rektor magnificusnya yang pertama.³⁷

Pada saat di Bandung inilah Soekarno juga berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker yang pada saat itu merupakan pemimpin organisasi *National Indische Partij* yang revolusioner yang membuat slogan “Merdeka dari Belanda”. Mereka menyerukan kepada para mahasiswa termasuk Soekarno supaya tidak terlalu tenggelam dalam studi mereka dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada usaha membebaskan negeri mereka.³⁸ Soekarno kemudian terpengaruh oleh slogan *National Indische Partij* “Indonesia bagi orang-orang Indonesia”, “toleransi agama”, “persamaan ras”, “perjuangan melawan kapitalisme”, “nonkooperasi”.³⁹

Pada bulan Juni 1926, Soekarno berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah insinyur dan tidak mau menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Soekarno telah memulai perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia di bawah panji nonkooperasi.⁴⁰ Karakter revolusioner Soekarno terbentuk dari rangkaian penderitaan hidup yang dialaminya hingga menjadi seorang yang nasionalis dan sangat membenci penjajah.⁴¹

³⁶ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.52.

³⁷ Solichin Salam, *op.cit.*, hlm.60.

³⁸ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.56.

³⁹ *Ibid.*, hlm.62.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.68.

⁴¹ Taufik Adi Susilo, *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*, Yogyakarta, Garasi, 2008, hlm. 19.

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung. Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tahun 1927. Aktivitas Soekarno di PNI menyebabkannya ditangkap Belanda pada bulan Desember 1929. Dihadapan pengadilan kolonial, Soekarno membuka kejahatan dan kebusukan imperialisme Belanda di Indonesia. Pleidoinya yang diucapkan dengan gagah berani, yang kemudian dibukukan dengan judul “Indonesia Menggugat” telah menggemparkan seluruh dunia.⁴² Ia kemudian dibebaskan kembali pada tanggal 31 Desember 1931.

Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yang merupakan pecahan dari PNI. Sebagai pemimpin pergerakan nasional, Soekarno tidak saja ahli sebagai penggerak, akan tetapi iapun ahli dalam pemikiran. Ia seorang pemimpin yang mampu menghasilkan banyak konsepsi, meskipun itu tidak berarti sepenuhnya baru. Bertolak pada tahun 1921 yaitu keterlibatan dalam Sarekat Islam, Soekarno telah mulai memadukan tiga gagasan yang berkembang pada saat itu yakni Nasionalis, Islam dan *Marxis*. Perpaduan inilah yang nantinya dijadikan dasar atau kunci sejati untuk memahaminya.⁴³ Pada tahun 1926 adalah tahun “*kaotik*” dalam dunia pergerakan di Indonesia, terjadi berbagai perpecahan di antara kelompok-kelompok itu terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan dan orientasi para pemimpinnya.⁴⁴

Melihat situasi demikian maka Soekarno kemudian tertantang untuk mempersatukan kelompok-kelompok tersebut terutama dengan menyatukan

⁴² Solichin Salam, *op.cit.*, hlm.76.

⁴³ Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*, Cornell University Press, hlm. 43.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

pandangan para pemimpinnya. Hal itulah yang melatar belakangi pemikirannya sebagaimana ia tulis dalam “Nasionalisme, Islam, dan *Marxisme*”, dimana ia menyerukan kerjasama yang lebih erat di antara ketiga golongan itu. Soekarno menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajah itu, ada tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia, yakni para pejuang Nasionalis, Islam, dan *Marxis* yang hendaknya bersatu. Bahtera yang akan membawa kepada Indonesia Merdeka hanyalah bahtera persatuan.⁴⁵

Sebagian besar dari pemikirannya selalu dikaitkan dengan persatuan bangsa, begitu juga dalam pemikirannya tentang masyarakat baru Indonesia, persatuan bangsa tetap mewarnai pemikiran dan ide-ide dalam perjuangannya untuk menentang kaum kolonial.⁴⁶ Dalam menyikapi ketiga aliran tersebut Soekarno berusaha mencari hubungan dan berusaha membuktikan bahwa dalam sebuah bangsa yang sedang terjajah tidak adanya manfaat jika saling berseteru antar penganutnya. Untuk kepentingan bangsa kedepan ketiga pengikut aliran tersebut harus bekerjasama menjadi sebuah kekuatan yang dapat diandalkan dalam perjuangan bangsa ini.

Pada awalnya, pemikiran Soekarno dipengaruhi ajaran *Marxisme*. Manuskrip-manuskrip Karl Marx, Friederick Engels, dan Lenin sudah dipahaminya ketika ia masih tinggal dengan keluarga H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya. Pada masa itu, Soekarno mulai menyelami pikiran tokoh-tokoh besar dunia. Diantara berbagai pikiran besar itu, Soekarno sangat tertarik dengan

⁴⁵ Taufik Adi Susilo, *op.cit.*, hlm. 77.

⁴⁶ G. Moedjanto, *Dari pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, USD, 2003, hlm.234.

historis materialisme ala *Marxis*. Pola analisa *Marxis* digunakannya untuk perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Soekarno sendiri menemukan pembenaran bahwa filosofi materialisme adalah landasan dari materialisme sejarah dan ia membenarkan bahwa konflik antara marxisme dan agama pada dasarnya adalah suatu kesalahan yang memperlemah perjuangan bangsa Indonesia. Nasionalisme menurut Soekarno merupakan kekuatan bagi bangsa-bangsa yang terjajah yang kelak akan membuka masa gemilang bagi bangsa tersebut. Pada dasarnya nasionalisme merupakan suatu aliran politik yang tumbuh di dalam suatu bangsa yang tertindas. Dengan nasionalismelah bangsa Indonesia akan mendirikan syarat-syarat hidup mereka yang bersifat kebatinan dan kebendaan.⁴⁷

Nasionalisme bangsa Indonesia dalam pemikiran Soekarno juga bercirikan Islam dan *marxisme*. Nasionalisme ini semula bersifat anti penjajah dan anti imperialisme, kemudian berkembang menjadi anti unsur-unsur yang datang dari Barat. Nasionalisme yang berkembang di Barat itu berbeda sekali dengan nasionalisme yang berkembang di Timur termasuk salah satunya di Indonesia. Nasionalisme di Barat bercirikan komersialisme, kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme, sedangkan di Timur nasionalisme bercirikan antikolonialisme dan anti Barat. Dengan demikian, nasionalisme semacam ini telah memberikan tempat yang baik bagi Islam dan *marxisme*. Kedua aliran tersebut menentang keras baik kolonialisme maupun imperialisme.⁴⁸

⁴⁷ Nazaruddin Syamsudin, *Ibid.*, hlm.38.

⁴⁸ Ign. Gatot Saksono, *Pancasila Soekarno*, Yogyakarta:CV.Urna Cipta Media Jaya, 2007, hlm55.

Bagi Soekarno, nasionalisme pada dasarnya mengandung prinsip kemanusiaan, cinta tanah air yang bersendikan pengetahuan serta tidak *chauvinisme*. *Marxisme* juga mengandung prinsip persahabatan dan penyokongan, anti kapitalisme dan imperialisme. Soekarno mempunyai ideologi yang kuat, seperti seorang *marxis*, ia menerima tesis mengenai massa rakyat yang diperas dan menderita, mengenai tirani kaum kapitalis, mengenai pertentangan yang tak dapat diperdamaikan di antara kelas-kelas serta kemenangan yang sebentar lagi bakal dicapai oleh kaum proletar, namun ia juga menyadari akan adanya suatu ikatan yang kuat dengan Islam.

Pemikiran Soekarno tentang ketiga aliran tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya tokoh-tokoh pergerakan nasional yang menganut ideologi tersebut, dan mereka juga mempunyai banyak pendukung yang tersebar di seluruh nusantara. Bagi banyak orang, persatuan antara nasionalisme, Islamisme, dan *marxisme* merupakan sesuatu yang hampir mustahil karena ketiganya mengandung unsur-unsur yang saling menolak. Soekarno sadar akan perbedaan antara ketiganya yakni jika nasionalisme menekankan pentingnya batas-batas dan kepentingan nasional, agama (Islamisme) pada dasarnya bersifat universal dan menolak batas-batas nasionalitas tetapi juga menolak materialisme ala Marx, sementara *marxisme* bersifat universal serta menolak batas-batas nasionalisme dan sekaligus juga menolak konsep-konsep religius Islam.

Meskipun demikian, bagi Soekarno, ia selalu optimis bahwa ketiga paham itu dapat saja bersatu. Ketiga paham itu tidak pertama-tama mengemukakan perbedaan-perbedaan, akan tetapi mengemukakan persamaan-persamaan mereka.

Oleh karena itu antara nasionalisme, Islamisme, dan marxisme terdapat titik pertemuan. Menurut Soekarno, kesadaran mengenai kekejaman kaum penjajahan telah memunculkan pergerakan rakyat dan dimanifestasikan dalam ketiga golongan tersebut dan selanjutnya menjadi kewajiban semua orang untuk berupaya mempersatukan ketiga golongan itu. Hal ini harus dilakukan karena mereka merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan.

Mereka mempunyai pandangan dari sudut yang berbeda, akan tetapi ke titik pandang yang sama yakni anti penjajahan. Gagasannya inilah yang selanjutnya mendominasi semua tindakannya dan yang merupakan kunci untuk mewujudkan harapan-harapannya yakni hanya dengan persatuan di dalam pergerakan yang dapat memberikan kekuatan yang cukup besar kepada tindakan-tindakannya untuk mencapai tujuan yang sama yakni mengusir penjajah dari bangsa ini.

Soekarno tidak merasa pesimis mengenai tugas mempersatukan aliran-aliran itu, tampak dari pernyataannya bahwa semua aliran itu tujuannya sama. Dengan demikian, maka pertama-tama mereka harus menjauhi segala perbedaan dan pandangan yang mengarah pada pertikaian diantara mereka. Setelah negara kolonial dibuka kedoknya yang mengeksploitasi rakyat, motif yang sebenarnya dari penjajahan dijelaskan, dan setelah ada pengidentifikasian yang sadar akan protes-protes di seluruh Asia, maka ditemukanlah lawan mereka. Mereka adalah lawan kaum nasionalis, karena mereka menguasai wilayah-wilayah Asia, mereka musuh golongan Islam karena kegiatan-kegiatan misi mereka, dan akhirnya mereka melawan kaum marxis, karena mereka pendukung sistem kapitalis, yang merintanginya meluasnya sosialisme. Bagi Soekarno sudah jelas dengan sendirinya

bahwa kaum nasionalis, Islamis, dan *marxis* harus bersatu dalam perjuangan melawan penguasa-penguasa asing.⁴⁹ Namun bukan hanya berbicara mengenai lawan bersama tapi juga menekankan adanya tujuan yang tunggal yang merupakan tujuan bersama yakni Indonesia merdeka. Jiwa nasionalisme Soekarno pada kelanjutannya, ia tuangkan dalam Pancasila yaitu sila kebangsaan.

B. Internasionalisme atau perikemanusiaan

Pada saat Soekarno masih tinggal bersama Tjokroaminoto pada tahun 1918, Soekarno berkenalan dengan *San Min Chu-I* dari Sun Yat Sen. Selain itu Abdul Muis, teman Tjokroaminoto yang juga merupakan salah satu pemimpin Sarekat Islam yang sangat berpengaruh ikut berperan dalam menentukan pemikiran Soekarno tentang internasionalisme. Dalam kongres nasional kedua Sarekat Islam dikatakan bahwa:

“Oleh karena keadaan kita sendiri sekarang begitu menyedihkan, maka dari kita dituntut segenap kekuatan kita keadaan itu menuntut upaya kaum nasionalis, yang tidak boleh menghambur-hamburkan kekuatannya. Untuk memperbaiki seluruh dunia, kita tidak perlu mulai dengan menjadi orang-orang internasionalis.”⁵⁰

Kemudian pada tahun-tahun berikutnya Soekarno menyampaikan bahwa dalam sila internasionalisme atau perikemanusiaan ditekankan bahwa nasionalisme yang dikehendaki bukanlah nasionalisme yang chauvinis tapi nasionalis yang berperikemanusiaan. Hal ini Soekarno mensitesiskan dari pemikiran Gandhi mengenai nasionalisme, “*My nationalism is humanity...*”. Perikemanusiaan selalu menyangkut kepentingan orang sedunia maka bangsa

⁴⁹ Bernard Dahm, *op.cit.*, hal 78.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.40.

Indonesia yang berperikemanusiaan menekankan nasionalisme yang hanya akan hidup subur dalam internasionalisme sedangkan internasionalisme juga hanya akan bisa hidup jika berakar pada bumi nasionalisme. Menghargai harkat kemanusiaan menjadi karakter khas bangsa yang asli. Dengan ini Soekarno menekankan bahwa nasionalisme merupakan akar internasionalisme. Internasionalisme tidak akan berkembang kalau didalamnya tidak ada nasionalisme begitu juga sebaliknya nasionalisme tidak akan berkembang kalau tidak hidup dalam tamanya sarinya internasionalisme.⁵¹

C. Mufakat atau Demokrasi

Pada sila mufakat atau demokrasi didorong oleh adanya pemikiran bahwa musyawarah atau mufakat adalah dasar dari segala upaya menuju keadilan, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Sistem demokrasi telah dirancang menjelang akhir 1920-an dan mulai terbentuk pada saat proses Soekarno masuk dalam pergerakan nasionalis.⁵² Konsep Indonesia tentang Demokrasi berkaitan dengan konsep yang dianutnya yaitu prinsip musyawarah, suatu pertukaran pendapat secara umum di antara-golongan-golongan kepentingan yang diwakili dan pada akhirnya menghasikan mufakat. Hal ini masih dipegang teguh dan dipraktikkannya dalam federasi pergerakannya tahun 1927, yang dibimbing oleh prinsip mufakat.

Pada tahun 1933 Soekarno mencoba melukiskan sebagai salah satu tujuan sosio demokrasi sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat, kekuasaan rakyat

⁵¹ Ign.Gatot Saksono, *op.cit.*, hlm 69.

⁵² Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm. 248.

harus terjamin di semua sektor, politik, ekonomi, dan budaya.⁵³ Mufakat senantiasa telah memainkan peranan yang penting dalam tradisi Indonesia. Mulai dari masyarakat desa sampai kepada badan-badan penasihat yang paling tinggi, keputusan diambil bukan atas dasar suara mayoritas, yang terlalu asing bagi alam pikiran yang sinkretistik (semua hal adalah satu), melainkan menurut asas mufakat. Dalam pembahasan-pembahasan umum (permusyawaratan), apabila ada yang tidak setuju maka pihak-pihak yang berbeda pendapat berkompromi sampai pada tercapainya mufakat. Sistem inilah yang hendak digunakan oleh Soekarno dan hal itu ia katakan bahwa berarti “sifat kembali pada diri kita pribadi”.

D. Kesejahteraan Sosial

Sila ini dibentuk mulai saat Soekarno masih menempuh pendidikan bersama Tjokroaminoto. Dalam sila kesejahteraan sosial diartikan dengan prinsip “tidak adanya kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka”. Selanjutnya, marhaenisme dikembangkan sebagai alternatif terhadap konsep proletar Karl Marx. Konsep ini lahir ketika Soekarno baru berumur 20 tahun dan bersepeda memutari Bandung selatan, ia bertemu dengan seorang petani kecil bernasib malang bernama Marhaen yang berjuang dengan kemampuannya sendiri demi kehidupannya. Ia mengerjakan sawah kepunyaannya sendiri dengan menggunakan alat-alatnya sendiri namun bukan seorang proletar karena ia tidak menjual tenaganya namun hidup dalam kemiskinan. Sejak saat itulah Soekarno terinspirasi oleh apa yang dikatakan oleh Marhaen. Soekarno berpikiran bahwa

⁵³ *Ibid.*, hlm. 246.

kita mempunyai kekuatan yang lebih untuk mempertahankan kehidupan masyarakat dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, Soekarno kemudian menggunakan nama marhaen untuk menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia (rakyat kecil).⁵⁴

Menurut Soekarno, untuk mencapai suatu masyarakat tanpa kelas-kelas tertindas di Indonesia, tidaklah cukup bagi kaum marhaen yang akan memperjuangkannya untuk menjadi kaum revolusioner borjuis dengan kemerdekaan sebagai tujuan akhir mereka. Mereka harus menjadi orang-orang revolusioner sosial dan tidak boleh berhenti sebelum terwujudnya kebahagiaan bagi semua orang, bagi seluruh komunitas Indonesia atau terciptanya masyarakat baru yang lebih adil. Kepada perjuangan itu, Soekarno memberikan nama yang baru saja ia ciptakan “sosio-nasionalisme” atau nasionalisme marhaen.⁵⁵

Hal ini merupakan salah satu upaya Soekarno dalam rangka menentang elitisme. Elitisme menurut Soekarno sangat berbahaya karena bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat melalui sistem feodal dan jika dibiarkan sikap ini akan memecah belah masyarakat dan menjadikan lestarnya kolonial serta menghambat demokratisasi. Hal ini untuk meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan.

Hal ini Soekarno mensitesiskan pada *San Min Cu I* dari Sun Yat Sen yaitu nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Kecuali itu, dia menggabungkan demokrasi ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial yang dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai faham Ratu Adil. Ini mengandung pengertian untuk

⁵⁴ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm.175-176.

⁵⁵ Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*. Jakarta, Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, 1959, hlm. 174.

semua rakyatnya hidup dalam kesejahteraan. Keadilan sosial tidak dapat tercapai hanya dengan prinsip permusyawaratan atau demokrasi yaitu melalui Badan Perwakilan Rakyat saja. Hal ini ditegaskan oleh Soekarno bahwa kesejahteraan yang berkeadilan sosial itu bukan hanya persamaan politis tetapi mencakup bidang ekonomi. Hal ini demi kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Dengan demikian antara kesejahteraan sosial dengan keadilan sosial merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

E. Ketuhanan

Bangsa Indonesia sudah mengimani adanya Hyang Ilahi lama sebelum kedatangan agama-agama di Nusantara. Sila Ketuhanan menggerakkan rakyat untuk memenuhi panggilan batinnya yang terdalam untuk berjuang keras mewujudkan kepercayaannya akan dunia yang lebih baik dalam Tuhan. Hal inilah yang mendorong rakyat mengetahui dari dalam dirinya suatu kehendak agar negara sebagai organisasi membantu rakyat menggali kerinduan akan Hyang Ilahi. Dorongan dari dalam untuk ber-Ketuhanan sudah ada sejak masa pra Hindu dengan adanya huruf “ha-na-ca-ra-ka-da-ta-sa-wa-la-ma-ga-ba-ta-nga” dan wayang Mahabarata-Ramayana.

Rasa keimanan Soekarno terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ia perkuat pada masa pembuangan Bung Karno ke Flores pada tahun 1933. Dalam masa pembuangannya, Soekarno sangat mendalami agama khususnya agama Islam. Berbagai pengetahuan tentang Islam dipelajarinya. Keyakinan agamanya terus tumbuh dalam jaman pendudukan Jepang.

Dalam masa pendudukan Jepang, pergerakan kebangsaan mengalami hambatan yaitu semua bentuk perkumpulan politik dilarang dan semua aspirasi politik menuju kemerdekaan disalurkan hanya lewat lembaga-lembaga yang dibentuk Jepang seperti Putera, Jawa Hokokai, Peta dan BPUPKI. Pada masa ini perjuangannya menunjukkan adanya polarisasi pergerakan kebangsaan untuk kemerdekaan, pada satu pihak terdapat golongan kebangsaan dengan paham kebangsaan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa tanpa membedakan agama dan tidak mendasarkan pergerakannya pada agama tertentu. Pada pihak lain, terdapat golongan Islam yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan Islam sebagai pegangan dasarnya dalam pergerakannya. Soekarno melihat adanya polarisasi kebangsaan dan Islam sebagai hambatan besar bagi terwujudnya suatu negara kebangsaan yang merdeka dan beraulat.

Untuk itu, berdasarkan pengalaman hidup dalam masa pembuangan yang mendekatkannya pada Tuhan dan pengalaman hidup pada jaman pendudukan militer Jepang yang menunjukkan tanda-tanda bahaya terhadap persatuan bangsa, Soekarno menemukan butir kelima dari pemikiran konsepsionalnya yaitu Ketuhanan, yang dapat menjembatani golongan kebangsaan dan Islam. Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri dalam keyakinannya masing-masing individu.

Ketuhanan bukan hanya sekedar keagamaan agama tertentu tapi juga kerinduan jiwa manusia Indonesia pada Tuhan, maka hal itu kemudian dapat diterima oleh semua golongan agama di Indonesia. Dengan demikian Soekarno

telah berpandangan jauh kedepan bahwa negara ini kelak akan menjamin kebebasan bagi setiap rakyatnya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain, negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa.

Segegap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama tertentu. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Namanya adalah Pancasila, sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.⁵⁶ Dalam hal ini menunjukkan bahwa Soekarno bukan seorang atheis, beliau adalah seorang yang beriman yang mengakui adanya Tuhan.

⁵⁶Muhammad Yamin, *Naskah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan(BPUPKI)*, Jakarta, Prapantja, 1945, hlm. 69-78.

BAB III

PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG PANCASILA

DISAMPAIKAN DALAM SIDANG BPUPKI

A. Soekarno Menyajikan Konsep Pancasila Dalam Sidang BPUPKI

Sejak tentara Jepang mendapat pukulan dari sekutu, pemerintahan Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Koiso (lihat lampiran 5) mulai memperkuat simpati dan dukungan rakyat Indonesia terhadap Jepang dengan memberikan janji kemerdekaan. Hal itu kemudian direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoozakai pada tanggal 1 maret 1945 (2605, tahun Showa 20) yang beranggotakan 62 orang (lihat lampiran 1).

BPUPKI mulai bersidang selama empat hari dengan penjelasan atas pemikiran politik para tokoh tentang dasar negara yang nanti akan didirikan. Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI (lihat lampiran 2), Soekarno menyajikan konsep definisi tentang dasar negara yang dia sebut Pancasila. Pancasila sebagai filosofi dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam sidang yang mendahuluinya yaitu:

1. masalah waktu kemerdekaan, sekarang atau nanti
2. masalah dasar negara yang oleh Soekarno disebut *Philosofische Grondslag*
3. masalah bentuk pemerintahan negara

Soekarno menekankan nasihat dari Gunseikan yang dalam nasehatnya mengatakan bahwa “bangsa yang hendak meneguhkan dasar kemerdekaannya

maka ia harus mempunyai keyakinan diri untuk sanggup membela negara sendiri dan juga mempunyai kekuatan yang nyata sebagai bangsa”.⁵⁷ Oleh karena itu kalau bangsa Indonesia walaupun dengan bambu runcing siap sedia mati mempertahankan tanah air Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia telah siap untuk merdeka.⁵⁸

Setelah ada kesanggupan untuk merdeka, Soekarno kemudian menyebutkan tiga syarat yang sederhana oleh *internationaalrecht*, yaitu sekedar bumi, rakyat, dan pemerintah yang teguh.⁵⁹ Soekarno kemudian mengemukakan dasar Indonesia merdeka atau *Philosofische Grondslag* untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka, yang diartikan sebagai jembatan emas.⁶⁰ Soekarno mengatakan bahwa dasar-dasar yang diungkapkannya berasal dari prinsip yang terkandung dalam satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu *gotong royong*.⁶¹

Dalam penyampaianannya, Soekarno tidak hanya menggantungkan konsep pemikirannya hanya pada salah seorang tokoh yang dikaguminya saja, melainkan dari berbagai banyak tokoh sesuai dengan kebutuhannya untuk mempertajam atau memperkuat konsepnya. Soekarno menggunakan pemikiran-pemikiran para tokoh lebih banyak sebagai alat untuk memperjelas pemikirannya sendiri daripada sebagai pengikut tokoh tersebut.

Dalam sidang BPUPKI ini Soekarno menyampaikan pemikirannya tentang Pancasila yang sebagai berikut:

1. Sila kebangsaan.

⁵⁷ Muhammad Yamin, *op.cit.*, hlm. 805.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 64

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 66.

⁶⁰ *Risalah Sidang BPUPKI*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1995, hlm. 63-64.

⁶¹ P.J. Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, *op.cit.*, hlm.11.

Soekarno mengulang tema lama, dengan menggunakan kiasan yang pertama kali digunakan Perhimpunan Indonesia dua warsa sebelumnya, dengan berkata:

“Bahkan seorang anak, apabila ia melihat peta dunia, dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia membentuk satu kesatuan gugusan pulau di antara dua samudera besar, samudera Pasifik, dan samudera Hindia, serta diantara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Seorang anakpun bisa mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, kepulauan Sunda kecil, Maluku, dan pulau-pulau lainnya di antaranya adalah satu kesatuan yang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Keseluruhan kepulauan ini ditakdirkan Tuhan menjadi kesatuan antara dua benua dan dua samudera itulah negara kita.”

Soekarno mengatakan dasar kebangsaan yang dimaksud bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit tapi menghendaki satu nationale staat. Di atas satu kebangsaan itu didasarkan negara Indonesia. Soekarno kemudian mulai dengan kutipannya *desire d’etre ensemble* dari Ernest Renan yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Selain itu, ia juga mengutip definisi Otto Bauer mengenai nasion sebagai “*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*.” Inilah menurut Otto Bauer satu natie (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).⁶²

Soekarno juga menambahkan bahwa bukan hanya melihat orang dan perasaan orangnya saja tapi juga harus mengingat tempat atau bumi yang didiaminya yaitu tanah air, disini diingatkan bahwa adanya hubungan antara orang dan tempat dan antara rakyat dan buminya. Indonesia didasarkan kepada geopolitik takdir Tuhan Yang Maha Esa dan abadi. Indonesia telah selalu ada secara alami. Walau bagian-bagiannya merasa punya komunitas sendiri misalnya

⁶² *Risalah Sidang BPUPKI, op.cit., hlm.72.*

Minangkabau, Pasundan, mereka hanya sebagian kecil dalam kesatuan yang merentang dari ujung utara Sumatera sampai Irian. Kesatuan yang ada itu sekarang harus segera dipersiapkan. Oleh karena itu, maka kemudian berfikir untuk mencari bentuk yang pantas agar Indonesia bisa sebaik mungkin melaksanakan fungsi sejarahnya dan memperkenankan rakyatnya menggapai cita-cita dalam zaman modern. Tanah air itu adalah satu kesatuan, bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan pulau-pulau diantara dua lautan besar, lautan Pasifik dan lautan Hindia, dan diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan demikian yang dinamakan tanah air menurut geopolitik adalah Indonesia yang bulat, bukan hanya meliputi Jawa, Sumatra, Borneo, Salebes, Ambon atau Maluku saja namun segenap segenap kepulauan menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera.⁶³

Soekarno juga mengutip pernyataan Gandhi, “buat saya, cinta saya pada tanah air itu, masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot sejati, karena saya manusia dan bercara manusia bukan binatang. Saya tidak mengecualikan siapa juga.” Inilah, kata Soekarno, rahasia yang telah memberikan kepada Gandhi kekuatan untuk mempersatukan orang-orang Islam, Hindhu, Parsi, Jain, dan Sikh. Oleh karena itu, Soekarno juga mencari rahasia seperti itu untuk mempersatukan orang-orang Islamis, nasionalis, dan *marxis*. Selain itu, agar nasionalisme tidak meruncing menjadi *chauvinisme* atau kebangsaan yang menyendiri maka Soekarno menambahkan bahwa cinta kepada tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu tetapi tanah air

⁶³ *Ibid*, hlm. 73.

Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Seperti halnya kata Gandhi: “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perkemusiaan”, “*My nationalism is humanity*”.⁶⁴

Soekarno telah melakukan pencarian yang lama sebelum ia sampai kepada suatu rumusan yang dapat memuaskan, tidak hanya orang-orang nasionalis, tetapi juga orang-orang marxis dan Islamis. Hasil pencarian itu, yang di sini dikutip secara lengkap, merupakan satu contoh yang baik sekali dari gaya ditaktik Soekarno.

Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan belaka, nasionalis yang bukan chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan–nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada lain-lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.⁶⁵

Soekarno mengatakan bahwa jangan berdiri di atas dasar seperti orang-orang Eropa yang mengatakan “*Deutschlandüber Alles*”, tidak ada yang setinggi Jermania yang katanya bangsanya *minulyo*, berambut jagung dan bermata biru, bangsa Aria yang dianggap bangsa tertinggi di atas dunia sedangkan bangsa lain tidak ada harganya dan meremehkannya. Negara Indonesia harus menuju persatuan dunia dan bahwa negara Indonesia yang merdeka kelak akan menyelaraskan pada persaudaraan dunia.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 76.

⁶⁵ Bernhard Dahm, *op.cit.*, hlm. 82.

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

Seperti pada penjelasan di atas bahwa negara yang didirikan adalah negara Indonesia Merdeka yang juga harus menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa sampai pada persaudaraan dunia, maka dalam pemikiran ini Soekarno menegaskan bahwa internasionalisme yang dimaksud bukanlah kosmopolitisme, yang tidak menginginkan kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia dan lain-lain.⁶⁶

Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur jika tidak berakar di dalam buminya nasionalisme dan nasionalisme juga tidak dapat hidup subur jika tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dengan kata lain, nasionalisme dan internasionalisme saling berkaitan erat satu sama lain.⁶⁷

3. Ketiga, negara harus dijalankan dengan prinsip perwakilan, musyawarah, dan mufakat.

Soekarno menjelaskan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya tapi bahwa semua untuk satu dan satu untuk semua. Soekarno yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.⁶⁸ Hal itu untuk menegaskan bahwa prinsip itu bukan asumsi dasar apapun yang mungkin menyediakan dasar Islami bagi negara, jadi:

“Jika dewan perwakilan rakyat punya seratus anggota maka mari kita berusaha keras, sehingga enam puluh, tujuh puluh delapan puluh, sembilan puluh anggota dewan perwakilan rakyat adalah muslim, tokoh-tokoh muslim terkemuka. Lalu dengan sendirinya, hukum yang dihasilkan dewan perwakilan rakyat itu akan Islami pula. Aku bahkan yakin bahwa Islam

⁶⁶ *Risalah Sidang BPUPKI, op.cit.*, hlm.76.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 76.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 77.

baru dapat dikatakan benar-benar hidup dalam jiwa rakyat apabila hal tersebut benar terjadi. 90 % daripada kita beragama Islam tapi lihat berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam. Hal itu merupakan bukti bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomer 3 yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan”.⁶⁹

Dengan kata lain, tidak ada satupun negara yang benar-benar hidup jika tidak ada perjuangan faham di dalamnya, baik negara Islam ataupun negara Kristen. Di dalam perwakilan rakyat, Islam maupun Kristen berjuang dan bekerja bersama-sama. Mufakat mengandalkan hati yang manusiawi dan wawasan luas. Jika bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila menjadi kenyataan maka syarat untuk mewujudkannya adalah berjuang. Menurut Soekarno, di dalam Indonesia merdeka itu, perjuangan harus berjalan terus. Demokrasi berdasarkan filsafat Pancasila oleh Soekarno disebut sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang bersenyawa dengan tuntutan keadilan sosial yang merupakan demokrasi di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

4. Keempat, Soekarno mengusulkan sila kesejahteraan sosial

Soekarno menjelaskan kesejahteraan social prinsipnya adalah tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Berdasar pada prinsipnya *San Min Chu I* ialah *Minttsu, Min Chuan, Min Cheng* yaitu nasionalis, demokrasi dan sosial maka prinsip yang diambil adalah prinsip kesejahteraan di kalangan rakyat. Dicontohkan di negara-negara Eropa adalah badan perwakilannya adalah demokrasi parlementer tapi justru kaum kapitalis merajalela, demokrasi di sana hanyalah demokrasi politik saja dan tidak ada keadilan sosial serta demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, “sekedar demokrasi politis” barat yang tidak peduli

⁶⁹ R.E. Elson, *The Idea Of Indonesia*, Jakarta, Serambi, 2008, hlm. 161.

dengan keadilan sosial dan menyebabkan “rakyat berada di tangan kapitalis”. Yang diperlukan tidak hanya “kesejajaran dalam politik” tapi “kesejajaran dalam bidang ekonomi juga”.⁷⁰

Soekarno mengusulkan untuk mencari demokrasi bukan demokrasi Barat tapi permusyawaratan yang memberi hidup yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Ratu Adil yang dimaksud selama ini dan diidam-idamkan adalah keinginan rakyat untuk sejahtera. Keinginan menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan dibawah pimpinan Ratu Adil. Oleh karena itu, persamaan bukan hanya persamaan politik saja namun di atas lapangan ekonomi juga harus ada persamaan yang artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Badan Permusyawaratan yang akan dibuat bukan badan permusyawaratan politik demokrasi saja tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip yaitu *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid*.⁷¹

5. Kelima, Soekarno mengajukan prinsip Ketuhanan.

Dalam prinsip ini, Soekarno menjelaskan bahwa bukan hanya bangsa Indonesia saja yang ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan yaitu Tuhannya sendiri. Soekarno mengatakan gagasannya bahwa “rakyat Indonesia tidak hanya harus percaya terhadap Tuhan, tapi setiap orang Indonesia harus percaya terhadap Tuhannya sendiri.”⁷² Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya secara

⁷⁰ R.E. Elson, *op.cit.*, hlm. 161.

⁷¹ Risalah Sidang BPUPKI, *op.cit.*, hlm. 80.

⁷² R.E. Elson, *op.cit.*, hlm. 161-162.

leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yaitu tidak ada egoisme agama dan hendaknya negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan.⁷³

Soekarno mengajak untuk mengamalkan dan menjalankan agama seperti agama Islam maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Cara berkeadaban adalah dengan hormat-menghormati satu sama lain. Dicontohkan bahwa Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang saling menghormati agama-agama lain. Nabi Isa juga telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Oleh karena itu, prinsip yang kelima adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur dan Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.⁷⁴ Dalam prinsip dasar kelima inilah segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan negara yang akan didirikan juga berasaskan Ketuhanan pula.

Kelima usulan prinsip dasar tersebut dinamakan Pancasila oleh Soekarno. Panca artinya lima dan sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia. Dalam mengejar kompromi terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang diusulkan dalam pidatonya yang ditawarkan secara tidak urut. Selain itu, Soekarno juga tidak bersikeras harus lima sila tapi dia mengusulkan tiga alternatif yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

Dalam perasannya menjadi Trisila yaitu yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan diperas menjadi satu dan dinamakan sosio nasionalisme. Kedua, demokrasi dan kesejahteraan diperas

⁷³ Risalah Sidang BPUPKI, *op.cit.*, hlm. 80.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

menjadi sosio demokrasi, dan yang ketiga adalah Ketuhanan. Namun jika yang dikehendaki hanya satu dasar saja maka Soekarno menawarkan adanya Ekasila yaitu *gotong royong*. *Gotong royong* berdasar dari perkataan Soekarno yakni bahwa “kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua”. *Gotong royong* adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Kekeluargaan adalah suatu paham yang statis tetapi *gotong royong* menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. *Gotong royong* merupakan pembantingan tulang dan pemerasan keringat bersama dan berjuang bersama pula. Selain itu, prinsip *gotong royong* mencakup diantara golongan yang kaya dan yang miskin, antara Islam dan Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.⁷⁵ Dalam hal ini yang terpenting adalah adanya kompromi atau kesepakatan dari berbagai pihak yang mengandung banyak perbedaan untuk dapat mencapai negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh.

Setelah pidato Soekarno yang diakhiri dengan tepuk riuh dari segenap orang yang hadir dalam sidang BPUPKI, tidak ada lagi pidato lain yang membicarakan dasar negara dan hal ini membuktikan bahwa pidato Soekarno tersebut telah diterima dan didukung oleh semua peserta yang menghadiri sidang BPUPKI secara aklamasi. Hal ini tidak lepas dari kepiawaian dan pengalaman Soekarno sebagai cerdik pandai. Hal itulah yang membedakan pidato Soekarno ini berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya yang diutarakan oleh Muhammad Yamin dan Soepomo. Hal ini bisa dilihat dari pidato yang mereka sampaikan sebagai berikut:

⁷⁵ Risalah Sidang BPUPKI, *op.cit.*, hlm. 82.

Pidato Muhammad Yamin

Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Yamin (lihat lampiran 4) yang mendapatkan kesempatan pertama untuk berpidato dihadapan sidang lengkap BPUPKI dalam pembukaan pidatonya menyampaikan rasa kegembiraannya bersama seluruh anggota akan kesempatan memberikan sumbangan rohani yang sepadan dengan keinginan rakyat “mau merdeka dan ingin bernegara berdaulatan”. Pidato Muhammad Yamin yang telah diucapkannya pada tanggal 29 Mei 1945 tentang dasar-dasar konstitusi juga telah tersusun secara sistematis dalam tulisan yang dimuat dalam bukunya yang berjudul “Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945” berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Di dalamnya dikemukakan lima dasar sebagai berikut:

a) Peri Kebangsaan

Diartikan bahwa negara kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut susunan kekeluargaan yang didasarkan pada kebangsaan dan Ketuhanan.

b) Peri Kemanusiaan

Diartikan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal. Dengan demikian kemanusiaan ini mengandung arti humanisme dan internasionalisme semua bangsa.

c) Peri Ke-Tuhanan

Dalam peri Ke-Tuhanan dijelaskan bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa.

d) Peri Kerakyatan

Dalam peri kerakyatan ini terkandung antara lain:

1. Permusyawaratan yang sesuai dengan peradaban asli Indonesia dan surat Asyura ayat 38 dari kitab Qur'an
2. Perwakilan yang menjadi dasar desa, negari, dusun, marga di seluruh Indonesia.
3. Kebijakan yang dimaksud hikmat kebijaksanaan yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan diri dari anarkhi, liberalisme, dan semangat penjajahan.

e) Kesejahteraan Rakyat atau keadilan sosial.⁷⁶

Pidato Soepomo

Selanjutnya dalam pidato oleh Soepomo (lihat lampiran 5) tentang sifat negara menangkap tiga permasalahan yaitu:⁷⁷

- a. Masalah hubungan negara dan agama
- b. Masalah bentuk pemerintahan
- c. Masalah hubungan negara dan ekonomi.

Menurut Soepomo untuk menjawab permasalahan itu kuncinya ialah pengertian negara (*staasidee*) yang dianut. Soepomo mengusulkan negara Indonesia merdeka yang hendak didirikan itu harus berdasarkan atas aliran pikiran negara (*staasidee*) yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan

⁷⁶ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Prapantja, 1959, hlm. 89

⁷⁷ P.J. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 44.

apapun tanpa membedakan golongan yang ada. Menurut aliran pikiran negara integralistik, negara harus bersifat badan penyelenggara, badan pencipta hukum yang timbul dari hati rakyat seluruhnya sebab negara adalah seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun secara hierarkis.⁷⁸ Jadi tidak ada dualisme antara negara dan individu.

Dalam menjelaskan hubungan negara dan agama disebutkan bahwa negara nasional yang bersatu itu tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, tetapi akan mengatasi semua golongan dan akan menghormati semua golongan baik besar maupun kecil. Dengan begitu, secara sendirinya urusan agama akan terpisah dari urusan negara, karena urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan yang bersangkutan.⁷⁹

Masalah bentuk pemerintahan, menurut pengertian negara integralistik yang terpenting ialah kepala negara dan semua badan pemerintahan mempunyai sifat pemimpin negara dan rakyat seluruhnya. Apa kedudukan kepala Negara itu tidak penting, yang penting dia harus memimpin rakyat seluruhnya, mengatasi semua golongan, dan bersifat mempersatukan negara dan bangsa. Untuk menjamin hal itu dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan, sehingga kepala negara dapat terus menerus berkomunikasi dengan badan permusyawaratan rakyat supaya senantiasa dapat mengetahui dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸⁰

⁷⁸ Muhammad Yamin, *op.cit.*, hlm. 113-114.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 89

Mengenai masalah hubungan negara dan ekonomi menurut aliran pikiran negara integralistik ialah dalam bidang ekonomi harus digunakan sistem sosialisme negara. Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara sendiri, tetapi pada hakikatnya negaralah yang menentukan tempat, waktu, dan jenis perusahaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau akan diserahkan kepada suatu badan hukum perseorangan itu semua tergantung pada kepentingan negara dan rakyat seluruhnya. Dalam hal ini negara memainkan peranan yang cukup penting demi kesejahteraan warga negaranya.⁸¹

B. Perbedaan Pendapat Dalam Sidang BPUPKI

Dalam sidang BPUPKI tersebut Soepomo mengangkat gagasan kuat mengenai kehebatan budaya Indonesia dan juga terpengaruh pemikiran organik Eropa, hal itu memberi satu pengaruh yang tahan lama dalam pembahasan dan masa depan Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa perkembangan politik negara Indonesia harus selaras dengan struktur sosial masyarakat Indonesia, yang bercirikan semangat kekeluargaan. Sesuai dengan itu, jika ingin mendirikan negara Indonesia maka negara harus berdasarkan gagasan dasar negara kesatuan, suatu negara yang bersatu dengan seluruh rakyat, yang berdiri di atas semua golongan dalam semua bidang. Individu hanyalah bagian dari negara, mewakili kepentingan rakyat. Yang perlu dihindari dengan segala cara adalah sistem yang mengutamakan individualisme dan segala dampaknya: “menolak individualisme

⁸¹ P.J. Suwarno, *op.cit.*, hlm. 47.

berarti juga menolak sistem parlementer, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang membuat orang sama persis dalam segala hal”.

Soepomo juga menentang keras gagasan negara Islam karena akan menyebabkan munculnya minoritas-minoritas kecil yang tak akan bisa bersatu dengan negara. Soepomo sepenuhnya tidak simpatik dengan gagasan negara federal yang tidak mendirikan satu negara melainkan beberapa negara, pandangan kesatuan membuat federalisme tidak diperlukan karena dalam negara Indonesia yang berupa negara kesatuan, semua golongan rakyat, semua daerah dengan ciri khas akan mendapatkan tempat dan kedudukan sebagai bagian negara secara keseluruhan. Terakhir, sistem negara kesatuan mensyaratkan negara mengendalikan unsur-unsur terpenting ekonomi demi kepentingan negara dan rakyat, dan ekonomi harus berdasarkan saling bantu dan kerja sama. Sedangkan Soekarno dan Muhammad Yamin lebih berhati-hati terhadap kekuasaan negara dan ideologi besar-besaran, serta berusaha menempatkan batas dan penyeimbang yang kuat bagi penerapan kendali yang bersatu dari sebuah dasar negara. Dalam penyampaian pandangan atau pemikiran di antara ketiga tokoh tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan, hal ini bisa terjadi karena yang menilai tentang dasar negara adalah para anggota BPUPKI. Dan ternyata pemikiran Soekarno tentang dasar negara lebih terlihat jelas dan kemudian dapat diterima secara aklamasi.

BAB IV
PIDATO SOEKARNO
TENTANG PANCASILA MENJADI INTI DARI
PEMBUKAAN UUD 1945

Dasar-dasar yang dikemukakan Soekarno dalam BPUPKI merupakan endapan pemikiran Soekarno sejak tahun 1918 yang kemudian tertuang dalam sila-sila. Sila-sila yang dirumuskan itu merupakan filsafat sosial yang matang yang diyakini oleh pemimpin-pemimpin nasionalis yang berpengaruh dan oleh orang yang nantinya menjadi pemimpin Indonesia. Dari berbagai pidato pada sidang BPUPKI, tidak ada pernyataan prinsipil atau dasar yang lebih jelas daripada pernyataan Soekarno yang dapat dijadikan contoh sebagai sintesis dari demokrasi barat, Islam Modern, *Marxis*, serta gagasan-gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan yang asli, yang merupakan dasar umum pemikiran sosial dari sebagian besar elit politik Indonesia sesudah perang.⁸²

Selain itu, sintesis yang digunakan oleh Soekarno adalah filsafat Jawa. Dia menegaskan bahwa “semua ini adalah satu” adalah kearifan yang paling dalam dari filsafat Jawa. Hal itu terlihat pada pidato Soekarno 1 juni 1945 yang menunjukkan bahwa Soekarno mencari modus kompromi antar kelompok nasionalis, sosialis, dan Islam. Dalam mengejar kompromi terlihat juga pada susunan sila-sila Pancasila yang diusulkan dalam pidatonya. Selain itu, Soekarno juga tidak bersikeras harus lima sila tapi dia mengusulkan tiga alternatif yaitu Pancasila, Trisila, dan Ekasila.

⁸² George Mc.T. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1970, hlm. 123.

Dalam hal ini yang terpenting adalah adanya kompromi atau kesepakatan dari berbagai pihak yang mengandung banyak perbedaan untuk dapat mencapai negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh. Keberhasilan telah dicapai oleh Soekarno usahanya mempersatukan segala macam perbedaan politik yang ada dalam suatu kompromi yang akhirnya mendapat dukungan secara aklamasi sehingga tersepakatinya Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sebuah negara diperlukan juga suatu dasar atau sumber hukum yang kemudian kembali diadakan sidang untuk memahaminya. Dalam hal ini, Undang-undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan motivasi dan asprasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber dari cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.⁸³ Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang perlu dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan menuangkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dasar negara dan ideologi bangsa maka akan mempunyai kekuatan hukum yang imperatif, yang mengikat semua warga negara untuk menjadikannya sebagai pandangan hidup dalam mematuhi dan melaksanakannya. Setelah sidang resmi BPUPKI pertama, ada masa reses sampai pada tanggal 10 Juli 1945. Pada masa reses itu dibahas mengenai rancangan Pembukaan Undang-undang Dasar.

⁸³ Ali Emran, *op.cit.*, hlm. 103.

A. Sidang BPUPKI II Dalam Merumuskan Pembukaan UUD 1945

Dengan berakhirnya rapat tanggal 1 Juni itu selesai pula seluruh persidangan pertama *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakan “reses” selama satu bulan lebih.⁸⁴ Sebelum memasuki masa reses itu, Badan Penyelidik telah membentuk suatu panitia kecil. Panitia kecil dibawah pimpinan Soekarno sebagai ketuanya dengan anggotanya antara lain:

1. Drs. Moh. Hatta,
2. Sutardjo Kartohadikusumo
3. Wachid Hasjim
4. Ki Bagus Hadikusumo
5. Oto Iskandardinata
6. Muh. Yamin
7. A.A. Maramis

Kesemuanya berjumlah delapan orang dan mereka bertugas menampung saran-saran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi para anggota berkenaan belum disepakatinya rancangan dasar negara yang oleh ketua telah diminta untuk diserahkan melalui sekretariat. Panitia kecil ini menerima beberapa usulan dan dimasukan dalam beberapa golongan yaitu:⁸⁵

1. Golongan usul yang minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya
2. Golongan yang usul mengenai dasar
3. Golongan usul yang mengenai soal *unificatie* atau *federatie*

⁸⁴ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 70.

⁸⁵ Risalah Sidang BPUPKI, *op.cit.*, hlm.88-89.

4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara
5. Golongan usul yang mengenai warga negara
6. Golongan usul mengenai daerah
7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara
8. Golongan usul yang mengenai negara
9. Golongan usul yang mengenai pembelaan negara

Dalam masa reses yang cukup panjang sekitar lima minggu para anggota BPUPKI tetap menjalankan kegiatan sesuai dengan agenda. Sebagian anggota BPUPKI ada yang tetap tinggal di Jakarta, mereka tetap mengadakan pertemuan-pertemuan. Sebagian lagi ada anggota BPUPKI yang pergi ke daerah-daerah menjalankan suatu misi memberikan sosialisai kepada masyarakat maupun untuk menampung aspirasi dari masyarakat mengenai rencana kemerdekaan Indonesia kelak dikemudian hari seperti yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Kekaisaran Jepang. Adapun dua hasil kegiatan para anggota BPUPKI pada masa reses ini yaitu:

1. Rancangan Undang-undang Dasar, yang disusun oleh tujuh orang anggota yaitu Prof. Dr.Pangeran A. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. R. Soepomo, Mr.R.Soewandi, Mr. R.P.Singgih, Mr. R. Sastromoeljono, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Mr.R.Soebardjo. Rancangan ini disampaikan secara tertulis kepada Ketua *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* pada tanggal 15 Juni 1945. Rancangan ini tidak dibahas dalam sidang kedua, namun empat diantara pengusul duduk dalam Panitia Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno, yaitu Prof.Dr.Pangeran A. Hoesein Djajadiningrat, Prof. Dr. R. Soepomo, Mr. R.P.Singgih, dan Mr.R.Soebardjo.⁸⁶

⁸⁶ *Risalah Sidang BPUPKI*, Jakarta, Sekretariat Negara RI, 1998, hlm. xxxiv.

2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibahas oleh 38 orang anggota BPUPKI dan para anggota *Chuo Sangi-In*, dan dirumuskan oleh Sembilan orang yaitu yaitu:

1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mr. A.A Maramis
4. Abikusno Tjokrosujono
5. Abdulkadir Moezakir
6. H. Agus Salim
7. Mr. Ahmad Subardjo
8. Wachid Hasjim
9. Muhammad Yamin

Perhatian utama dari yang disebut Panitia Sembilan ini adalah mencari modus persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang sudah timbul dalam sidang pertama BPUPKI. Pada rapat pertama persidangan kedua Badan Penyelidik pada tanggal 10 Juli 1945, Panitia kecil itu dimintai laporan oleh Ketua Radjiman yang telah dipenuhi oleh ketuanya yaitu Soekarno.⁸⁷

B. Penjabaran Pancasila Soekarno Dalam Pembukaan UUD 1945

Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini memuat empat alenia. Alenia pertama memuat pandangan filsafat tentang kemerdekaan dan penjajahan. Alenia kedua memuat cita-cita nasional, yaitu suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alenia ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dengan pengakuan bahwa hal itu dicapai atas berkat rahmat Allah

⁸⁷ Nugroho Notokusanto, *Mengamankan Pancasila Dasar Negara. op.cit.*, hlm. 11.

Yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur. Alenia keempat rumusan tentang empat tugas pemerintah, bentuk negara dan kedaulatan, serta lima dasar negara Pancasila.⁸⁸ Sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila terurai secara sistematis di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat ini. Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 cukup jelas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan pada masa selanjutnya wujudnya akan tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 di dalamnya mengandung pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan.

Secara lebih lengkap rancangan pembukaan yang dibuat oleh Panitia Kecil pimpinan Soekarno adalah sebagai berikut:

“Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁸⁹

⁸⁸ *Risalah Sidang BPUPKI, op.cit.*, hlm. xxxv.

⁸⁹ *Risalah Sidang BPUPKI, op.cit.*, hlm. 95.

Demikianlah rancangan preambule yang diusulkan oleh panitia kecil pimpinan Soekarno berdasarkan dari penyelidikan usul-usul dan mendapat sambutan yang hangat dari semua anggota yang ada. Oleh karena itu, penyelidikan usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada didalam lingkungan anggota *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*. Soekarno sendiri mengharapkan supaya seluruh anggota *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* mengingat menetapkan hati, bahwa sidang yang kedua ini hendaknya menjadi sidang terakhir *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*.

Soekarno sebagai pimpinan Panitia Kecil berharap dengan cepat dapat mewujudkan persatuan nasional bangsa Indonesia. Pada saat bersidang, Soekarno sebagai *Gityoo Zyunbi Sangi-In* berkata:

“Persatuan membawa kekuatan, tetapi kekuatan tidak boleh tidak pun menyelenggarakan persatuan. Siapa yang bersatu, bangsa yang bersatu tentu bangsa itu kuat, bangsa yang kuat, tentu bersatu. Marilah kita sekarang menunjukkan ke hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia seluruh dunia melintasi lima benua dan tujuh samudera, bahwa bangsa Indonesia telah kuat untuk merdeka, dan oleh karenanya bangsa Indonesia itu bersatu bulat dan tidak ada retak di dalam dada bangsa itu. Persatuan membawa kekuatan, kekuatan membawa persatuan. Siapa yang tidak bersatu tidak kuat. Siapa tidak kuat, tidak bersatu (*Dharma evehato hanti*). Inilah ucapan saya sebagai semboyan pengunci daripada pidato saya untuk menutup sidang *Tyuuo Sangi-In*. Marilah tuan-tuan yang terhormat, demikianlah ajakan Panitia Kecil kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita lekas bersatu faham agar lekas menyelenggarakan hukum dasar Indonesia, marilah kita lekas mendapat Indonesia Merdeka, dengan lekas mendapat Negara Indonesia Merdeka”⁹⁰.

Pada kelanjutannya, rancangan preambule nantinya disepakati menjadi Pembukaan UUD dengan sedikit perubahan terutama yang menyangkut sila pertama yang tetuang pada alenia keempat.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan untuk mematangkan pembahasan mengenai dasar negara serta tiga unsur negara yaitu wilayah negara, warganegara serta pemerintahan negara. Selain itu, dibahas pula rancangan Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, termasuk lima prinsip dasar negara yang diusulkan Soekarno pada sidang BPUPKI I yaitu Pancasila dengan urutannya yang baru. Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 13 Juli dibahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar oleh Ketua Panitia Kecil Prof.Mr.Dr.Soepomo.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai ganti *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* yang kemudian ditambah sendiri anggota-anggotanya oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang.⁹¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPKI telah diambil alih oleh rakyat Indonesia dari pihak Jepang.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk tidak mempergunakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI, tetapi mempergunakan Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Sembilan dalam masa reses tanggal 22 Juni 1945. Panitia Sembilan menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan disahkan. Oleh Muh. Yamin rumusan hasil Panitia Sembilan itu kemudian diberinya nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Rumusan Kolektif daripada dasar negara Indonesia Merdeka berbunyi sebagai berikut:

⁹¹ Nugroho Notokusanto, *op.cit.*, hlm. 73.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹²

Dalam sidang terdapat sedikit ketegangan antar golongan yang tetap tidak dapat dihindarkan namun keinginan untuk bersatu selalu tetap diutamakan oleh semua golongan. Oleh karena itu, pernyataan pemimpin Masyumi, Wachid Hasjim berkata bahwa yang terutama kita perlukan pada waktu ini adalah persatuan bangsa yang tak terpecahan.⁹³ Hal ini menunjukkan bahwa golongan Islam, bahkan pada saat nasib negara Islam yang sejak lama menjadi cita-cita mereka dapat dikesampingkan dan mereka bersedia pada prinsipnya untuk berkompromi demi masa depan negara yang merdeka yang telah lama mereka cita-citakan.

Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan mencari kompromi untuk menemukan suatu penyelesaian bersama yang akan memungkinkan setiap orang akan menyetujui negara Indonesia yang akan dibentuk yang mengakomodasi kepentingan semua golongan yang ada. Untuk tujuan itu maka dibentuklah sebuah panitia khusus yang diketuai oleh Soekarno dan dihadiri oleh wakil-wakil dari golongan nasionalis dan golongan Islam dalam jumlah yang sama. Panitia ini

⁹² Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Djakarta-Amsterdam. 1954, hlm.12.

⁹³ H.J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun*. The Hague dan Bandung, V. Hoeve, 1958, hlm.89.

kemudian berhasil menyusun suatu kompromi yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang nantinya akan merupakan pembukaan UUD Indonesia.

Dalam pembukaan UUD tersebut, Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara dan kewajiban menjalankan Syari'at Islam hanya berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Namun dalam persidangan tetap terjadi perdebatan mengenai rumusan itu dan bahkan golongan Islam menambahkan lagi bahwa presiden negara yang akan dibentuk itu harus beragama Islam. Untuk itu dilakukan kembali kompromi antar golongan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Pada akhirnya dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan antar golongan yang berbeda aliran dan kemenangan bagi Soekarno atas gagasannya bahwa hanya mufakat yang bulat di kalangan semua aliran dapat membuka jalan yang bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Atas prakarsa Muhammad Hatta setelah menerima pesan dari dari seorang opsir Kaigun dan tokoh-tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur seperti Latuharhary dan Maramis yang merasa keberatan dengan sila pertama maka kemudian disampaikan keberatan dan dikatakan bahwa apabila sila tersebut tidak diubah maka golongan Kristen tidak akan menerimanya.⁹⁴ Oleh karena itu diusulkan untuk menghapus tujuh kata. Tujuh kata tersebut yaitu dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan itu diajukannya setelah berkonsultasi dengan empat pemuka Islam yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan. Dan dari konsultasi dengan tokoh-tokoh Islam terjadi kesepakatan dan bisa

⁹⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung, ITB, 1981, hlm. xi.

menerimanya.⁹⁵ Itulah perubahan yang penting dalam menyatukan segala bangsa, oleh karena itu, sila pertama dari dasar negara yang tercantum di dalam pembukaan itu yang semula berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹⁶

Dengan adanya perubahan pada sila pertama telah membuat perwakilan Indonesia timur bisa menerima. Dan golongan nasionalis juga merasa lega sebab persatuan selama ini yang dicita-citakan telah dapat terwujud. Dengan adanya perubahan - perubahan tersebut otomatis rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar juga mengalami perubahan sebagai berikut :

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁷

⁹⁵ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 agustus 1945*, Djakarta, 1970, hlm. 59.

⁹⁶ Risalah Sidang BPUPKI, *op. cit.*, hlm. 414.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 417.

Dalam pembukaan dapat dilihat perumusan lima prinsip dasar negara yaitu pada alenia keempat yang merupakan bentuk kristalisasi dari nilai-nilai yang ada dan telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perwujudan Pancasila di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu:⁹⁸

1. Sila pertama

Dirumuskan dalam kalimat, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...”.

Kalimat ini memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah yang telah memberikan rahmat kepada bangsa Indonesia berupa kemerdekaan.

2. Sila kedua

Dirumuskan dalam kalimat:

- “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan....”
- “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ...mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka...” (alenia II).

3. Sila ketiga

Dirumuskan dalam kalimat atau kata:

- ...negara Indonesia, ...bersatu, berdaulat... (alenia II).
- ...supaya berkehidupan kebangsaan... (alenia III).
- ...pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu

⁹⁸ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta, Rajawali press, 1992, hlm. 104-105.

dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia...(aleniaIV).

4. Sila keempat

Dirumuskan dalam kalimat atau kata:

- ... kemerdekaan negara Indonesia, yang berdaulat... (alenia II).
- ...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya...(alenia III).
- ...negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat... (alenia IV)

5. Sila kelima

Dirumuskan dalam kalimat atau kata:

- ...penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan...perikeadilan (alenia 1).
- Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang...adil dan makmur (alenia II).
- ...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (alenia IV).

Dari perumusan dalam Pembukaan UUD 1945, terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila telah mendapatkan bentuk normatif di dalam pembukaan sehingga dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan penguatan prinsip dasar jiwa Pancasila. Untuk lebih detailnya, maka urutan sila-sila dalam Pancasila berubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah usulan penghapusan tujuh buah kata tersepakati dan pada akhirnya melahirkan perubahan tersebut maka semua anggota sidang menyatakan setuju dengan suara bulat, dan dengan adanya penyempurnaan-penyempurnaan tersebut maka kemudian disahkanlah pembukaan UUD negara Indonesia. Sesuai dengan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental dari negara Indonesia, mempunyai kedudukan yang sangat kuat, tetap dan tidak dapat diubah oleh siapapun, maka rumusan Pancasila yang tercantum di dalamnya juga bersifat kuat, tetap, dan tidak bisa diubah pula oleh siapapun. Pancasila dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 secara politik merupakan hasil konsensus dan perjanjian luhur negara dan secara yuridis-konstitusional merupakan dasar dan ideologi negara. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang sah tercantum pula dalam Pembukaan UUD 1945.

BAB V

KESIMPULAN

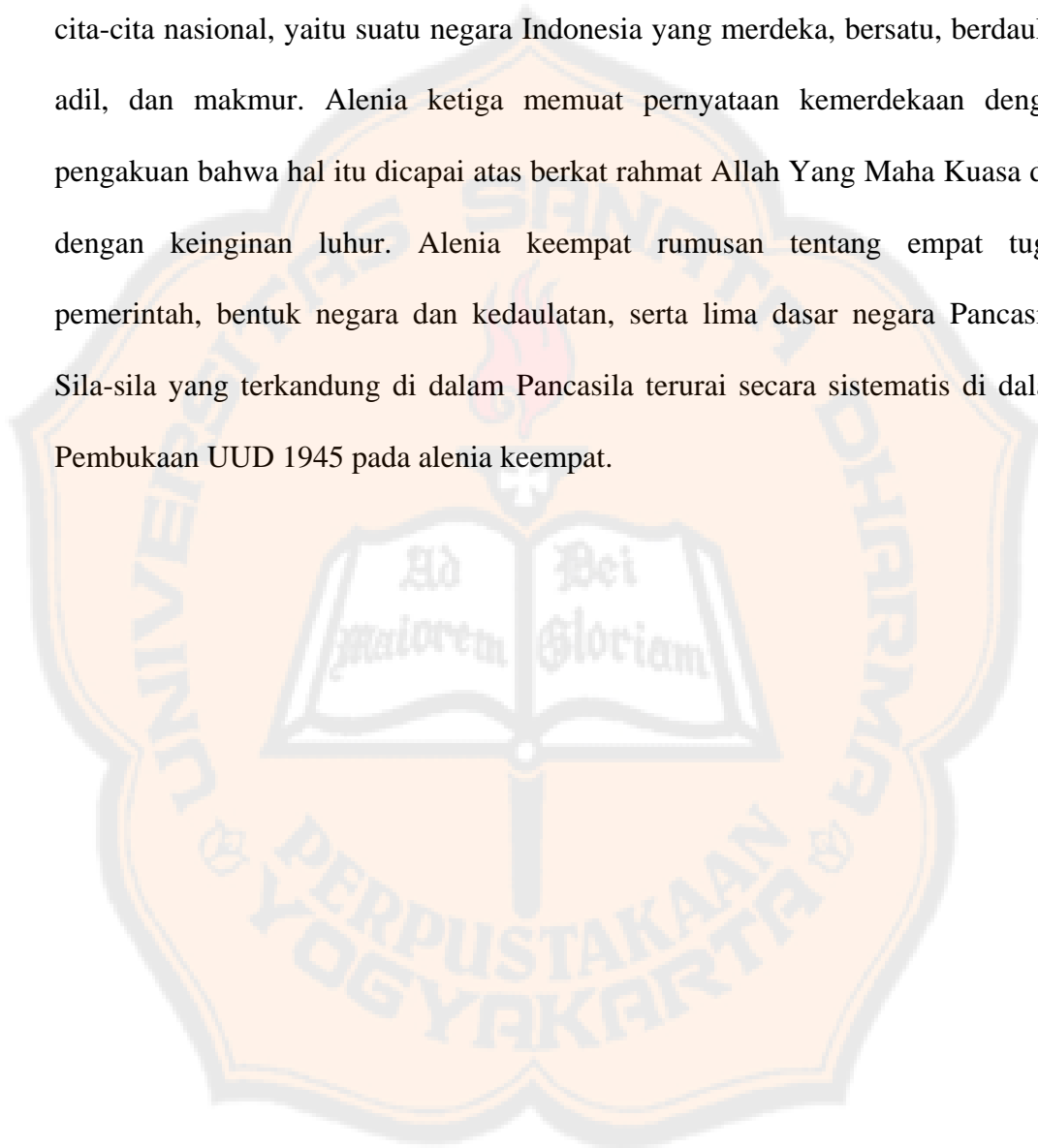
Dalam penelitian mengenai “Pancasila 1 Juni 1945” dibahas tiga permasalahan yaitu Pertama, apa latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila; Kedua, bagaimana pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); Ketiga, bagaimana pidato Soekarno dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945. Dari uraian Bab I, II, III, IV, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila adalah adanya realitas masyarakat Indonesia yang pluralis dan multi etnis dengan adat istiadat, kepercayaan dan ciri khas kebudayaan yang berbeda. Kunci dari pemikiran Soekarno didasari oleh konsep mitologi Jawa yakni konsep kepercayaan masyarakat Jawa sebagaimana tercermin dalam cerita-cerita wayang, ide Ratu Adil, dan Jayabaya. Filsafat-filsafat Jawa tersebut menunjukkan peran pentingnya pengaruh kebudayaan Jawa yang mendasari pemikiran-pemikiran Soekarno dalam proses sosialisasi politik dan perkembangan intelektualitas Soekarno sampai pada pemikiran tentang dasar negara. Dengan pengetahuan pendidikan dari Barat pada zaman penjajahan Belanda Soekarno merasakan sendiri bentuk diskriminasi sebagai seorang *inlander*. Dengan adanya diskriminasi tersebut telah melahirkan nasionalisme dan anti terhadap penjajah Belanda, disisi lain dari pendidikannya Soekarno juga mendapat berbagai ilmu

pengetahuan yang menjadi modal pemikiran tentang konsep dasar negara. Pengalaman politik di zaman Belanda Soekarno dipengaruhi oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mempengaruhi pemikirannya hingga terbentuknya konsep tentang Pancasila.

Pemikiran Soekarno tentang Pancasila disampaikan dalam sidang BPUPKI secara jelas dengan menggunakan konsep-konsep para tokoh Barat seperti Marx, Engels, Lenin, Sun Yat Sen, dan Mohammad Gandhi namun konsep tersebut hanya digunakan sebagai penguatan konsep pemikirannya sendiri. Soekarno juga menyampaikan pemikirannya secara terperinci dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Soekarno mengusulkan lima prinsip sebagai dasar negara yang dinamakan Pancasila. Dalam penyampaianya, Soekarno menggunakan kompromi yang terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang diusulkan dalam pidatonya yang ditawarkan secara tidak urut. Selain itu, Soekarno juga tidak bersikeras harus lima sila tapi dia mengusulkan tiga alternatif yaitu Pancasila, Trisila yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi, Ketuhanan, dan Ekasila yakni *gotong royong*. Menurut Soekarno, yang terpenting adalah adanya kompromi atau kesepakatan dari berbagai pihak yang mengandung banyak perbedaan untuk dapat mencapai negara Indonesia merdeka yang berdaulat penuh. Setelah pidato Soekarno yang diakhiri dengan tepuk riuh dari segenap orang yang hadir dalam sidang BPUPKI, tidak ada lagi pidato lain yang membicarakan dasar negara dan hal ini membuktikan bahwa pidato Soekarno tersebut telah diterima dan didukung oleh semua peserta yang menghadiri sidang BPUPKI secara aklamasi.

Pidato Soekarno tentang Pancasila dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD ini memuat empat alenia. Alenia pertama memuat pandangan filsafat tentang kemerdekaan dan penjajahan. Alenia kedua memuat cita-cita nasional, yaitu suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alenia ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dengan pengakuan bahwa hal itu dicapai atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur. Alenia keempat rumusan tentang empat tugas pemerintah, bentuk negara dan kedaulatan, serta lima dasar negara Pancasila. Sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila terurai secara sistematis di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy.
1966. *Sukarno An Autobiography*. Jakarta: Gunung Agung.
- Agus Surata.
2002. *Runtuhnya Negara bangsa*. Yogyakarta. UPN veteran press. edisi I.
- Benda, H.J.
1958. *The Crescent and the Rising Sun*. The Hague dan Bandung: V.Hoeve.
- Dahm, Bernhard.
1987. *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
-
- Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*. Cornell University Press.
- Elson, R.E.
2008. *The Idea Of Indonesia*. Jakarta: Serambi.
- Endang Saifuddin Anshari.
1981. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: ITB.
- Gatut Saksono, Ign.
2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: CV Uma Cipta Media Jaya.
- Giebels, Lambert.
2001. *Soekarno Biografi 1901 – 1950*. Jakarta: Grasindo.
- Gottschalk, Louis.
1983. *Understanding History : A Primer of Historical Method*. Jakarta : UI Press.
-
1986. *Mengerti Sejarah*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haryono, Ign.
1994. “ *Nasionalisme Dewasa Ini : Beberapa Lontaran*.
- Ismaun.
1990. *Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia Dan Dasar Negara RI*, Bandung, CV.Yulianti

- Kahin, George Mc.T.
1970. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca, N.Y: Cornell University Press.
- Koentjaraningrat.
1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo.
1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto.
1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G.
2003. *Dari pembentukan Pax Neerlandica sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yogyakarta: USD.
- Moh Hatta. Et al. (Panitia Lima).
1970. *Sekitar Proklamasi 17 agustus 1945*. Djakarta.

1980. *Uraian Pancasila*. Jakarta: Mutiara.
- Muhammad Ridwan Indra.
1987. *Peristiwa-Peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Yamin.
1954. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djakarta-Amsterdam.

1959. *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*. Jakarta: Prapantja.

1988. *Soekarno, Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek.*, Jakarta: CV. Rajawali
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z.Rubin.
2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta.
- Purwadi.
2004. *Sejarah Perjuangan Presiden Soekarno*. Jakarta: Buana Pustaka.
- Ramlan Surbakti.
Memahami Ilmu Politik. Jakarta.

- Rini Yunarti, D.
2003. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Buku Kompas
- Roeslan Abdugani.
Indonesia Menatap masa Depan. Jakarta: Pusat Merdeka
- Rohan, Ernest.
apakah bangsa Itu ? (terjemahan). Bandung
- Rozikin Daman.
1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali press.
- Sartono Kartodirdjo
Pembangunan Bangsa. Jogjakarta: Aditya Media.
- S. A. Kodhi dan R. Soejadi.
1988. *Filsafat, Ideologi, dan Wawasan Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Solichin Salam.
1966. *BUNG KARN0:Putera fadjar*. Djakarta: Gunung Agung.
- Sukarno.
1959. *Dibawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi.
- Sutarjo Adisusilo, J.R, (Ed.).
2003. *1938: Ngablak Dan Dunia Dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Universtas Sanata Dharma.
-
1996. “ *Nasionalisme Italia pada abad ke XIX* “ dalam *Nasionalisme di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Suwarno, PJ.
1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
-
2003. *Tatanegara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Taufik Adi Susilo.
2008. *Soekarno Biografi Singkat 1901-1970*. Yogyakarta: Penerbit Garasi.
-
1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
-
1998. *Risalah Sidang BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN



Lampiran 1

Susunan Anggota

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(BPUPKI)

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Wedyadiningrat

Wakil Ketua : Itibangase Yosio

R.P. Soeroso

Anggota :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Abikoesno Tjokrosoejoso | 15. Mr. Muh. Yamin |
| 2. Hadji Ah. Sanoesi | 16. R.A.A. Soemitro Kolopaking |
| 3. K.H. Abdul Halim | 17. Mr. Dr. R. Koesoemah |
| 4. Prof.Dr. R. Asikin | Atmadja |
| Widjajakoesoema | 18. Mr. J. Latuharhary |
| 5. M. Aris | 19. R.M. Margono |
| 6. Abdul Kadir | Djojohadikoesoemo |
| 7. Dr. R. Boentaran martoatmodjo | 20. Mr. A.A. Maramis |
| 8. B.P.H. Bintoro | 21. K.H. Masjkoer |
| 9. Ki Hajar Dewantara | 22. K.H.M. Masoer |
| 10. A.M. Asaad | 23. Moenandar |
| 11. Prof. Dr. P.A.H.Djajadiningrat | 24. A.K. Moezakir |
| 12. Drs. Moh. Hatta | 25. R. Oto Iskandar Dinata |
| 13. Ki Bagoes Hadikoesoemo | 26. Parada Harahap |
| 14. Mr. R. Hindromartono | 27. B.P.H. Poeroebojo |

- | | |
|--|---|
| 28. R. Abdoelrahim Pratalykrama | 45. .M.T.A. Soerjo |
| 29. R. Roeslan Wongsokoesoemo | 46. Mr. Soesanto |
| 30. Prof. Ir. R. Rooseno | 47. Mr. Soewandi |
| 31. H. Agoes Salim | 48. Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat |
| 32. Dr.Samsi | 49. K.H.A. Wachid Hasjim |
| 33. Mr. R.M.Sartono | 50. K.R.M.T.H. Woerjaningrat |
| 34. Mr. R. Samsuedin | 51. R.A.A. Wirantakoesoemo |
| 35. Mr. R. sastromoeljono | 52. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro |
| 36. Mr. R. Singgih | 53. Ny. Mr. Maria Ulfa Santoso |
| 37. Ir. Soekarno | 54. Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito |
| 38. R. Soedirman | 55. Oei Tjong Hauw |
| 39. R. Soekardjo Wirjopranoto | 56. Oei Tiang Tjoei |
| 40. Dr. Soekiman | 57. Liem Koen Hian |
| 41. Mr. A. Soebardjo | 58. Mr. Tan Eng Hoa |
| 42. Prof. Mr. Dr. Soepomo | 59. P.F. Dahler |
| 43. Ir. R.M.P. Soerahman Tjokroadisoerjo | 60. A. Basweda |
| 44. M. Sutardjo Kartohadikoesoemo | |

Anggota Tambahan:

1. K.H. Abdul Fatah Hasan
2. R. Asikin Natanegara
3. BKPA Soerjo Hamidjojo
4. Ir. Pangeran M. Noor
5. Mr. M. Besar
6. Affar Abdul K

Lampiran 2



Gambar 1. Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai

Sumber:

http://www.e-dukasi.net/mapok/mp_files/mp_288/images/h_30.jpg

Lampiran 3



Gambar 2. Soekarno

Sumber:

<http://berandakawasan.wordpress.com/2009/12/12/biografi-presiden-indonesia/>

Lampiran 4



Gambar 3. Muhammad Yamin

Sumber:

http://www.depdiknas.go.id/sejarah/menteri/14_muhyamin.jpg

Lampiran 5



Gambar 4. Soepomo

Sumber:

<http://id.wiki.detik.com/mediawiki/images/thumb/a/a6/Supomo.jpg/180px-Supomo.jpg>

Lampiran 6



Gambar 5. Perdana Menteri Koiso

Sumber:

<http://en.wikipedia.org/wiki/File:Koiso2.jpg>

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Mata Pelajaran : SEJARAH

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas : XI IPS

Semester : 2

Tahun Pelajaran : 2009/2010

Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

Kompetensi Dasar	INDIKATOR	Kegiatan Belajar Mengajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber/ Bahan/ Alat
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
1.Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila. 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui kajian pustaka, diskusi kelompok, dan presentasi siswa dapat menganalisis latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila. 	Pancasila 1 Juni 1945. Uraian Materi : <ul style="list-style-type: none"> Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila. 	a. Tugas kelompok b. Tugas individu c. Presentasi d. Ulangan harian e. UTS dan UAS f. Fortopolio	<ul style="list-style-type: none"> Laporan tertulis (Essay) Laporan hasil diskusi 	Terlampir	2 x 45 Menit	a. Sumber : <ul style="list-style-type: none"> Suwarno, PJ. 2003. <i>Tatanegara Indonesia</i>. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Muhammad Yamin. 1954. <i>Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia</i>. Djakarta-Amsterdam.

<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan proses jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUP KI) tentang Pancasila. •Mendeskripsikan perumusan pidato Soekarno menjadi inti dari pembukaan UUD 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> •Melalui kajian pustaka, diskusi kelompok dan presentasi, siswa dapat menganalisis proses jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUP KI) tentang Pancasila. •Melalui kajian pustaka, diskusi kelompok dan presentasi, siswa dapat menganalisis perumusan pidato Soekarno menjadi inti dari pembukaan UUD 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> •proses jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUP KI) tentang Pancasila. •Perumusan pidato Soekarno menjadi inti dari pembukaan UUD 1945. 					<ul style="list-style-type: none"> • Bradika, I Wayan. 2006. <i>Sejarah untuk SMA</i>. Jakarta: Erlangga <p>b.Alat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet • Foto
---	--	--	--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> •Merefleksikan nilai-nilai yang dapat diperoleh dari mempelajari pemikiran Soekarno menyatukan masyarakat Indonesia yang pluralis yang tertuang dalam Pancasila pada 1 Juni 1945 dan intinya dijadikan sebagai dasar negara. 	<ul style="list-style-type: none"> •Nilai-nilai universal yang dapat diambil dari kepemimpinan Soekarno 					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 19 Februari 2010
Guru Mata Pelajaran

(.....)
NIP.

(Sulistiyorini Kusumastuti)

Lampiran 8**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

Sekolah	: SMA
Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas / Semester	: XI / 2
Materi Pokok	: Pancasila 1 Juni 1945
Waktu	: 2 x 45 Menit
Metode	: CTL (<i>Cooperative Teaching Learning</i>)

1. Standar Kompetensi

Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang

2. Kompetensi Dasar

Menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia

3. Indikator

- a. Mendeskripsikan latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila.
- b. Mendeskripsikan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI.
- c. Mendeskripsikan perumusan pidato Soekarno menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.
- d. Menuliskan makna mempelajari tentang pemikiran Soekarno dalam menyatukan bangsa Indonesia yang pluralis dalam pemikirannya mengenai Pancasila.

4. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi siswa diharapkan mampu :

1. Menjelaskan latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila.
2. Menjelaskan pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI.
3. Menjelaskan pidato Soekarno dirumuskan menjadi inti dari pembukaan UUD 1945.
4. Menjelaskan nilai-nilai perjuangan para tokoh nasional bangsa Indonesia dalam upaya mendirikan negara merdeka dan merumuskan dasar negara.

5. Materi Pembelajaran

- a. Latar belakang pemikiran Soekarno mengenai Pancasila.
 - Pendidikan Soekarno di zaman penjajahan Belanda
 - Pengalaman politik Soekarno
- b. Pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI.
 - Penyajian konsep Pancasila Soekarno dalam sidang BPUPKI
 - Perbedaan pendapat dalam sidang BPUPKI
- c. Pidato Soekarno dirumuskan menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.
 - Sidang BPUPKI merumuskan dasar negara.
 - Sidang BPUPKI II merancang Pembukaan UUD 1945
 - Penjabaran Pancasila Soekarno dalam Pembukaan UUD 1945

6. Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan 1

- a. Pendahuluan (5 menit)
 - Motivasi :Siswa dapat menjelaskan latar belakang pemikiran Soekarno, pemikiran Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan dalam sidang BPUPKI serta perumusan pidato Soekarno dijadikan sebagai inti dari Pembukaan UUD 1945.

- Prasyarat :Siswa telah mengerti secara garis besar tentang perkembangan pengaruh Barat pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial.
 - Apersepsi : Guru melakukan tanya jawab kepada siswa tentang Soekarno
- b. Kegiatan Inti (30 menit)
- Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok dan diberi tugas untuk berdiskusi.
 - Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang yang mendapat materi yang berbeda antara lain:
 - Kelompok 1 : Keadaan sosial dan pendidikan Soekarno
 - Kelompok 2 : Pendudukan Jepang
 - Kelompok 3 : BPUPKI-PPKI
 - Kelompok 4 : Rumusan dasar negara Soekarno, Yamin, Soepomo
 - Kelompok 5 : Piagam Jakarta
 - Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dan siswa lain diberi kesempatan untuk bertanya atau menanggapi.
- c. Penutup (10 menit)
- Guru mengklarifikasi jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan bagi jawaban yang benar.
 - Guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil laporan diskusi.
 - Refleksi : guru bersama siswa merefleksikan nilai-nilai yang diperoleh setelah mempelajari materi mengenai pemikiran Soekarno menyatukan masyarakat pluralis yang tertuang dalam Pancasila dan merumuskannya menjadi sebagai dasar negaral.
 - Tindak lanjut : guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk membuat laporan tertulis berupa artikel tentang biografi pengalaman politik Soekarno.

7. Media Pembelajaran

Buku Paket, Foto Tokoh (Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soepomo), Peta.

8. Penilaian

a. Penilaian produk

Jenis tagihan : Tes

Contoh Tes :

- 1) Jelaskan latar belakang kehidupan sosial Soekarno!
- 2) Jelaskan latar belakang pendidikan dan pengalaman politik Soekarno!
- 3) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya Jepang ke Indonesia!
- 4) Jelaskan proses jalannya sidang BPUPKI!
- 5) Jelaskan nilai-nilai apa saja yang dapat diperoleh dari aktivitas Soekarno selama perjuangannya menyatukan seluruh masyarakat pluralis yang diwujudkan dalam Pancasila sebagai dasar negara!

b. Penilaian proses

- Jenis tagihan : Laporan tertulis

Contoh:

1. Buatlah artikel tentang biografi pengalaman politik Soekarno sampai dengan masa proklamasi kemerdekaan!

- Penilaian ketrampilan kooperatif

No	Nama	Menghargai teman	Mengambil giliran	Mengajukan pertanyaan	Mempresentasikan	Menjawab pertanyaan	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1-5, dengan kriteria :

Skor 1 : pasif tidak kooperatif dan tidak menghargai teman

Skor 2 : pasif tidak kooperatif, dapat menghargai teman

Skor 3 : pasif kooperatif, dapat menghargai teman

Skor 4 : aktif kooperatif dan menghargai teman

Skor 5 : sangat aktif, sangat kooperatif dan dapat menghargai teman

Hasil :

No	Jumlah Skor	Nilai	Keterangan
1	21 – 25	81 – 100	Amat baik
2	16 – 20	61 – 80	Baik
3	11 – 15	41 – 60	Cukup
4	6 – 10	21 – 40	Kurang
5	0 – 5	0 – 20	Sangat kurang

$$N = \frac{\text{Jumlah Skor}}{25} \times 100\%$$

$$NA = \frac{\text{Nilai proses} + \text{Nilai produk}}{2}$$

Keterangan :

N = Nilai

NA = Nilai akhir

c. Tindak lanjut

1. Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi Standar Kelulusan Minimal sebesar 65%
2. Memberikan program remidi bagi siswa yang tingkat pencapaiannya kurang dari 65%
3. Memberikan program pengayaan bagi siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 65%

9. Sumber Bacaan

1. Muhammad Yamin. 1954. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djakarta-Amsterdam.
2. Suwarno, PJ. 2003. *Tatanegara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
3. Bradika, I Wayan. 2006. *Sejarah untuk SMA*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Mengetahui
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 19 Februari 2010
Guru Mata Pelajaran

(.....)

(**Sulistiyorini Kusumastuti**)